

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA
MADURETNO KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Nurai'ni

NIM: 16130085



**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA
MADURETNO KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah
Satu Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

Nurai'ini

NIM: 16130085



**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA MADURETNO KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Oleh:

Nurai'ni

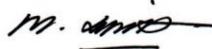
NIM. 16130085

Telah disetujui

Pada tanggal 12 Juni 2023

Oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA

NIP. 196205071995031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Alfiana Yuli Efianti, MA

NIP. 197107012006042001

HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA
MADURETNO KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nurai'ni (16130085)

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 6 Juli
2023 dan dinyatakan

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata
satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

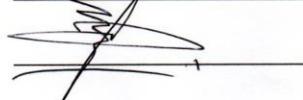
Panitia Ujian
Ketua Sidang
Drs. M. Yunus, M. Si
NIP. 196903241996031002
Sekretaris Sidang
Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031001
Pembimbing
Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031001
Penguji Utama
Dr. H. Ali Nasith, M.Si., M.Pd.I
NIP. 196407051986031003

Tanda Tangan









Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang




Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.
NIP. 1965040319980310

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang senantiasa tulus mencintai, merawat, dan mendidik saya. Saya percaya bahwa tanpa perjuangan mereka, saya bukanlah siapa-siapa”

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

– **Nelson Mandela**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Nurai'ini

Malang, 12 Juni 2023

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurai'ni

NIM : 16130085

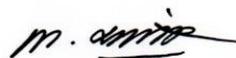
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Maka selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA

NIP. 196205071995031001

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurai'ni

NIM : 16130085

Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial (PIPS)

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuknya.

Malang, 21 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Nurai'ni
NIM: 16130085

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, selalu kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengannya kita mendapat rahmat, nikmat, serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga dapat melaksanakan fungsi kita di muka bumi ini sebagai kholifah Allah dengan husnul khatimah. Sholawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluq Allah yang datang untuk membimbing kita menuju ke jalan yang diridhainya dan patut menjadi tauladan ummat Islam hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang tak terhingga, atas petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, walaupun didalam-Nya masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang mana hal itu memang benar-benar bersumber dari kelemahan penulis. Semoga penulisan ini dapat menambah wawasan baru dalam bidang keilmuan serta pembaca pada umumnya. Penulisan ini tidak lepas dari dukungan bimbingan serta kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Alfiana Yuli Efianti, MA, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

3. Seluruh staf dan karyawan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan banyak pengetahuan, arahan, serta bantuan dalam pelayanan akademik selama studi di Universitas ini.
4. Kepada seluruh teman Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
5. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu sehingga penulis dapat lancar mengerjakan tugas akhir ini.

Karya tulis ilmiah ini sudah tentu masih banyak kekurangan, namun atas bimbingan serta arahan yang diberikan akhirnya tulisan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Kritik dan saran selalu penulis harapkan agar bisa lebih maju dan juga demi memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam proposal ini, karena penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Malang, 21 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori	16
B. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Setting Penelitian	42
C. Sumber Data.....	44

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Prosedur Penelitian.....	53
BAB IV	56
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	56
A. Paparan Data	56
B. Temuan Penelitian.....	67
1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri	67
2. Hasil dan Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri	76
BAB V.....	78
PEMBAHASAN	78
A. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri	78
1. Komunikasi.....	79
2. Sumber Daya	80
3. Disposisi	85
4. Struktur Birokrasi	86
B. Hasil Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.....	88
1. Akses Pendidikan	90
2. Mencegah Anak Putus Sekolah.....	92
3. Peningkatan Akses Kualitas Pendidikan	93
BAB VI.....	96
KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	96
DAFTAR RUJUKAN.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tingkat Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Formal.....	33
Tabel 2: Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 3: Jadwal Penelitian	55
Tabel 8: Batas-batas Wilayah Desa Maduretno	58
Tabel 4: Batas-batas Wilayah Desa Maduretno	59
Tabel 5: Kesejahteraan Masyarakat	64
Tabel 6: Angka Anak Putus Sekolah di Desa Maduretno.....	66
Tabel 7: Kepala Desa Maduretno.....	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Model Implementasi Program Menurut David C. Korten	18
Bagan 2: Kerangka Berpikir.....	39
Bagan 3: Struktur Organisasi Desa Maduretno.....	61
Bagan 4: Implementasi Program PKH.....	79
Bagan 5: Hasil Program PKH	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Grafik Jumlah Penduduk	63
Grafik 2: Mata Pencarian Penduduk	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Desa Maduretno dalam Peta	60
---	----

ABSTRAK

Nurai'ni. 2023. *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A

Kata Kunci: *Keluarga Harapan. Pendidikan, Implementasi*

Pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan dianggap sebagai investasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya melakukan intervensi terhadap masalah-masalah kemiskinan. Dalam konteks Desa Maduretno penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi program tersebut memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Maduretno.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. 2) Mengetahui hasil Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif informasi penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaksana kebijakan program PKH, Kepala Desa, Pendamping Desa dan juga Penerima /Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Observasi/pengamatan dilaksanakan terhadap berbagai implementasi kebijakan di lapangan. Analisa dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen pendukung dan pengambilan gambar di lapangan lalu peneliti menganalisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Maduretno dijalankan berdasarkan prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; 2) hasil program keluarga Harapan (PKH) di desa Maduretno memberikan dampak terhadap tingkat pendidikan masyarakat dalam tiga aspek: Akses pendidikan; mencegah anak putus sekolah; serta akses pendidikan yang berkualitas.

ABSTRACT

Nurai'ni. 2023. *Implementation of the Family Hope Program in Improving Community Education in Maduretno Village, Papar District, Kediri Regency*. Thesis. Department of Social Science Education. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A

Keyword: *Family Hope. Education, Implementation*

Education is considered a key factor in economic development and is considered a beneficial investment to improve the quality of human resources, which in turn will have an impact on increasing work productivity. The Family Hope Program is one of the government's programs in an effort to intervene in poverty problems. In the context of Maduretno Village, this study will see how the implementation of the program provides benefits to improve the quality of education of the people of Maduretno Village.

The objectives of this study are: 1) Knowing the Implementation of the Family Hope Program in improving community education in Maduretno Village, Papar District, Kediri Regency. 2) Knowing the results of the Family Hope Program in improving community education in Maduretno Village, Papar District, Kediri Regency.

This study used a qualitative research approach. In qualitative research, research information is collected using *in-depth interview*, observation and documentation methods. In-depth interviews were conducted with PKH program policy implementers, Village Heads, Village Assistants and also Beneficiaries/Beneficiary Families (KPM). Observations are carried out on various policy implementations in the field. Document analysis is carried out on supporting documents and taking pictures in the field and then researchers analyze them.

The results showed that: 1) The implementation of the Family Hope Program in Maduretno Village was carried out based on the principles of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure; 2) the results of the Family Hope (PKH) program in Maduretno village have an impact on the community's education level in three aspects: Access to education; prevent children from dropping out of school; and access to quality education.

تجريدي

نور عين. 2023. تنفيذ برنامج الأمل العائلي في تحسين التعليم المجتمعي في قرية مادوريتنو، بابار، كيديري. بحث. قسم تعليم العلوم الاجتماعية. كلية التربية والتعليم. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق

مشرف: أ. د. الحاج محمد زين الدين، ماجستير الآداب

كلمات مفتاحية: عائلة الأمل. التعليم، التنفيذ

يعتبر التعليم عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية ويعتبر استثماراً مفيداً لتحسين جودة الموارد البشرية، وبدور التعليم سيكون له تأثير على زيادة إنتاجية العمل. برنامج الأمل العائلي (Program PKH/Keluarga Harapan) هو أحد برامج الحكومة في محاولة تدخل في مشاكل الفقر. في سياق قرية مادوريتنو، ستبحث الباحثة في كيفية تقديم تنفيذ البرنامج لفوائد لتحسين جودة التعليم لأهالي قرية مادوريتنو.

كانت أهداف هذا البحث هي: (1) معرفة تنفيذ برنامج الأمل العائلي في تحسين التعليم المجتمعي في قرية مادوريتنو، بابار، كيديري. (2) معرفة نتائج برنامج الأمل العائلي في تحسين التعليم المجتمعي في قرية مادوريتنو، بابار، كيديري.

يستخدم هذا البحث مقارنة البحث النوعي. في البحث النوعي، يتم جمع المعلومات باستخدام المقابلات المتعمقة (*indepth interview*) والملاحظة والتوثيق. تم إجراء مقابلات متعمقة مع منفي سياسة برنامج الأمل العائلي (PKH) ورئيس القرية ورفيق القرية وكذلك المستفيدين / العائلات المستفيدة (KPM). تم إجراء ملاحظات حول تنفيذ السياسات المختلفة في الميدان. تم إجراء تحليل للوثائق الداعمة والتقاط الصور في ميدان ثم قامت الباحثة بتحليلها.

نتائج هذا البحث هي: (1) يتم تنفيذ برنامج الأمل العائلي في قرية مادوريتنو على أساس مبادئ الاتصال والموارد والتصرف والهيكلي البيروقراطي. (2) نتائج برنامج الأمل العائلي (PKH) في قرية مادوريتنو لها تأثير على مستوى التعليم المجتمعي في ثلاثة جوانب: الوصول إلى التعليم؛ منع الأطفال من التسرب من المدرسة؛ والوصول إلى تعليم جيد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Negara-negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan dalam segi ekonomi, melainkan juga ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan pangan yang layak.¹

Dalam pandangan Islam, ketika membahas tentang kemiskinan, penting untuk menekankan upaya perhatian, pembelaan, dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai kelompok mampu. Kelompok yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, baik secara individu maupun melalui lembaga-lembaga yang ada, sehingga tingkat kemiskinan dalam masyarakat dapat diminimalisir. Jika kelompok mampu ini tidak memperhatikan nasib kaum miskin, maka mereka dapat dianggap sebagai pendusta agama, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3.²

¹ Istiana Hermawati, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)* (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012), 1.

² Irvan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
 تَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka yang tidak memperhatikan kebutuhan dasar kaum miskin, seperti memberi makan kepada orang yang kelaparan, tidak akan mendapatkan penghargaan dan keberkahan dari-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta menekankan tanggung jawab kita untuk membela dan melindungi hak-hak mereka.

Ayat di atas juga menggambarkan bahwa dalam pandangan Islam, kepedulian terhadap kaum miskin dan upaya untuk mengatasi kemiskinan merupakan tindakan yang dihargai dan dianggap sebagai bagian integral dari praktik keagamaan. Hal ini mengajak umat Muslim untuk melibatkan diri secara aktif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam ilmu-ilmu sosial, dikemukakan bahwa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan lima bidang utama yang dikenal sebagai "big five," yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Konsep kesejahteraan ini mencakup kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan sosial kepada mereka yang

kurang mampu di bidang-bidang tersebut, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Selain tanggung jawab pemerintah, kesejahteraan sosial juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam membantu sesama yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam masyarakat.³

Berdasarkan fakta kemiskinan yang meningkat dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan:

“Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.”⁴

³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Jurnal *Lentera Hati*, 2012.

⁴ Ditjen Jaminan Sosial RI, “*Program Keluarga Harapan*,” Kementerian Sosial RI § (2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM). Keluarga-keluarga ini harus memenuhi syarat dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. PKH mengharuskan Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM) untuk menjalani pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, memberikan imunisasi, serta memantau tumbuh kembang anak. Selain itu, PKH juga mendorong anak-anak untuk bersekolah, dengan tujuan mengubah perilaku RTSM dalam menghargai pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku ini diharapkan dapat mengurangi jumlah anak usia sekolah yang bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan. PKH menjadi solusi penting dalam mengatasi masalah pendidikan, terutama dalam mengurangi tingkat pendidikan yang rendah.⁵

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan individu di masa depan dan dianggap sebagai kunci dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi yang berharga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas kerja. Dengan kata lain, pendidikan dianggap sebagai faktor

⁵ Ibid., 7.

penting yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan memperkuat ekonomi suatu negara.⁶

Berdasarkan Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2017, terdapat masalah angka putus sekolah yang masih tinggi di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah ini menyebabkan rendahnya peringkat indeks pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong anak-anak agar tetap bersekolah pada usia remaja, dan perlu memberikan perhatian khusus pada mereka yang berada di luar sistem pendidikan.

Kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelanjutan pendidikan anak. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi perekonomian keluarga yang kurang memadai. Banyak anak usia sekolah mengalami hambatan dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius terhadap masalah ini untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah juga memiliki akses yang adil dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat berkontribusi pada

⁶ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi* (Bandung: Erlangga, 2006), hlm. 138.

mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka.⁷

Desa Maduretno merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Desa Maduretno terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Cengkirejo, Dusun Slambur Kidul dan Dusun Maduretno itu sendiri. Jumlah penduduk Desa Maduretno sebanyak 2.557 jiwa yang terbagi dalam 823 kepala keluarga. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Maduretno masih tergolong rendah. Dibuktikan pada tahun 2019, jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan SD sebanyak 1.008 orang, SLTP sebanyak 434 orang, dan SLTA sebanyak 492 orang. Selain itu, 15% dari anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) tidak lulus SD ataupun tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Perekonomian keluarga merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Mayoritas penduduk Desa Maduretno bekerja sebagai petani dan buruh tani yang penghasilannya tidak pasti dan tergantung pada hasil panen.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”**.

⁷ Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial RI, *“Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019”* (Jakarta, 2018), hlm. 16.

⁸ Profil Desa Maduretno (dokumen desa)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana hasil Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui hasil Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam meningkatkan pendidikan.

b. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai potensi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru penulis mengenai Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian penelitian terdahulu ditujukan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini mengungkapkan penelitian

terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti dan melihat perbedaan-perbedaannya dengan tujuan untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Dalam orisinalitas penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Patia Sopa⁹ menjelaskan mengenai peran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena ada beberapa peserta PKH yang tidak memenuhi kriteria yang tepat, sehingga bantuan tetap diberikan meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Ketidakpartisipasian ini dikarenakan adanya faktor lingkungan yang tidak mendukung.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Patia Sopa, penelitian Shella Yulia Rosalina menunjukkan bahwa Program PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sudah sesuai dengan tujuan dari PKH. Pada pelaksanaannya metode yang digunakan oleh pendamping PKH adalah dengan metode individual dan kelompok.¹⁰

⁹ Patia Sopa, "Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 87

¹⁰ Shella Yulia Rosalina, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan ngaliyan kota semarang (Analisis Bimbingan Penyaluran Islam)", *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2018, hlm. 96.

Senada dengan hasil penelitian Shella Yulia Rosalina, penelitian Rusydi menunjukkan bahwa bantuan PKH mempengaruhi partisipasi pendidikan anak, yaitu mencapai 96,8 persen. Selain itu, hasil dari pembuktian hipotesis juga menunjukkan bahwa bantuan PKH berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan anak.¹¹

Penelitian lain juga dilakukan oleh Syahriani tentang kontribusi PKH dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu menunjukkan hasil yang positif, yaitu PKH mampu meringankan beban keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka hingga minimal sampai pendidikan dasar 9 tahun dan anak-anak yang awalnya malas untuk bersekolah, menunjukkan perubahan yang positif setelah adanya dana bantuan dari PKH. Pelaksanaan PKH di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng tidak hanya menimbulkan dampak yang positif. Dampak negatif yang terjadi setelah adanya PKH adalah dana bantuan tidak tepat sasaran karena ada sebagian warga yang menggunakan dana bantuan PKH tidak untuk kebutuhan sekolah anaknya, melainkan untuk kebutuhan lainnya. Dampak negatif lainnya yaitu ada sebagian masyarakat yang bergantung pada dana bantuan PKH sehingga malas untuk bekerja.¹²

¹¹ Rusydi, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie", *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 17, no. 1 (2017): 77–84.

¹² Syahriani, "Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng", *Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2016, hlm. 103.

Berbeda dengan penelitian Shella Yulia Rosalina, Rusydi dan Syahriani, penelitian Nurul Fatma Hasan menunjukkan bahwa penggunaan dana bantuan pendidikan dari pemerintah melalui Program Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan belum berjalan sebagaimana fungsinya karena penyalahgunaan dana pendidikan. Penyalahgunaan dana pendidikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor ekonomi orang tua yang lemah, perilaku konsumtif orang tua, kurangnya edukasi dari pemerintah tentang tujuan dan sasaran dana bantuan yang diberikan, serta manajemen keuangan yang buruk.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah membahas tentang Program Keluarga Harapan bidang pendidikan. Namun, fokus penelitian pada penelitian sebelumnya membahas tentang hasil dan epektifitas Program Keluarga Harapan. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang hasil Program Keluarga harapan saja, melainkan juga tentang bagaimana Implementasi dari Program Keluarga Harapan.

¹³ Nurul Fatma Hasan, “Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 1 (2017): 1–18.

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Peneliti
1.	Patia Sopa, Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dalam perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019	Mengkaji tentang peran PKH untuk meningkatkan partisipasi sekolah	a. Pembahasan ditinjau dari perspektif ekonomi islam b. Jenis penelitian lapangan (<i>field Research</i>)	a. Pada penelitian terdahulu membahas tentang peran PKH. Namun, tidak menjelaskan tentang implementasi dari Program Keluarga Harapan b. Jenis penelitian deskriptif kualitatif
2.	Shella Yulia Rosalina, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (analisis Bimbingan Penyuluhan Islam), Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2018.	Mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan	a. Fokus penelitian tentang PKH dalam hal pengentasan kemiskinan b. menggunakan analisis bimbingan penyuluhan islam	a. Fokus penelitian tentang penerapan PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat

3.	Rusydi, Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Jurnal, Journal of Economic Management & Business, 2016	Mengkaji pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap tingkat pendidikan	a. Menggunakan pendekatan kuantitatif b. Teknik analisis data menggunakan model persamaan regresi linear sederhana	a. Menggunakan pendekatan kualitatif. b. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman
4.	Syahriani, Kontribusi PKH dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Desa Marioraja kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2016.	Mengkaji PKH bidang Pendidikan dan dampak dari adanya PKH	a. Fokus penelitian untuk mengetahui kontribusi dan dampak PKH terhadap pendidikan siswa kurang mampu b. Jenis penelitian deskriptif kualitatif	a. Fokus penelitian tidak hanya membahas tentang dampak PKH, namun juga tentang bagaimana implementasi dari PKH b. Jenis penelitian studi kasus
5.	Nurul Fatma Hasan, Evektifitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo), Jurnal, Jurnal Program	Mengkaji PKH bidang pendidikan	a. Fokus penelitian pada evektifitas PKH b. Objek penelitian pada siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo	a. Fokus penelitian pada implementasi PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat b. Objek penelitian pada keluarga peserta PKH di Desa Maduretno.

	Studi PGMI, 2017			
--	---------------------	--	--	--

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian serta mengetahui arah dan tujuan penelitian ini, maka akan dipaparkan penegasan judul sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi proposal penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi kajian pustaka, sebagai landasan pembahasan hasil penelitian dan sebagai landasan teori dalam memberikan gambaran umum

tentang apa yang akan dibahas serta juga akan dipaparkan kerangka berfikir penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur penelitian dan pustaka sementara.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada Bab IV membahas tentang paparan data dan temuan penelitian, pada bab ini berisi uraian yang terdiri dari gambaran umum latar penelitian, paparan data penelitian, dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Pada Bab V membahas tentang pembahasan hasil temuan yang berisi jawaban atas masalah penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab VI berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Implementasi

Implementasi adalah proses terpenting ketika membahas tentang penerapan program baik yang bersifat sosial ataupun dalam dunia pendidikan. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sebatier dalam sholihin Abdul Wahab,¹⁴ menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku. Sementara itu, Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono,¹⁵ mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses untuk melakukan kebijakan agar dapat mencapai hasil yang dituju.

Menurut Charles O. Jones dalam Agustino¹⁶ ketika melaksanakan aktivitas implementasi program, terdapat tiga macam aktivitas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Organisasi: Pelaksanaan suatu program membutuhkan struktur organisasi yang jelas, sehingga dibutuhkan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, serta metode agar program tersebut dapat memberikan hasil.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 65.

¹⁵ A G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 13.

¹⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), 169–70.

- 2) Interpretasi: para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- 3) Penerapan: perlu adanya ketentuan atau prosedur pelaksanaan program, agar program dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Marilee S. Grindle, keberhasilan suatu implementasi program atau kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian atau *outcomes*, yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal tersebut dapat ditinjau melalui dua hal berikut, yaitu:

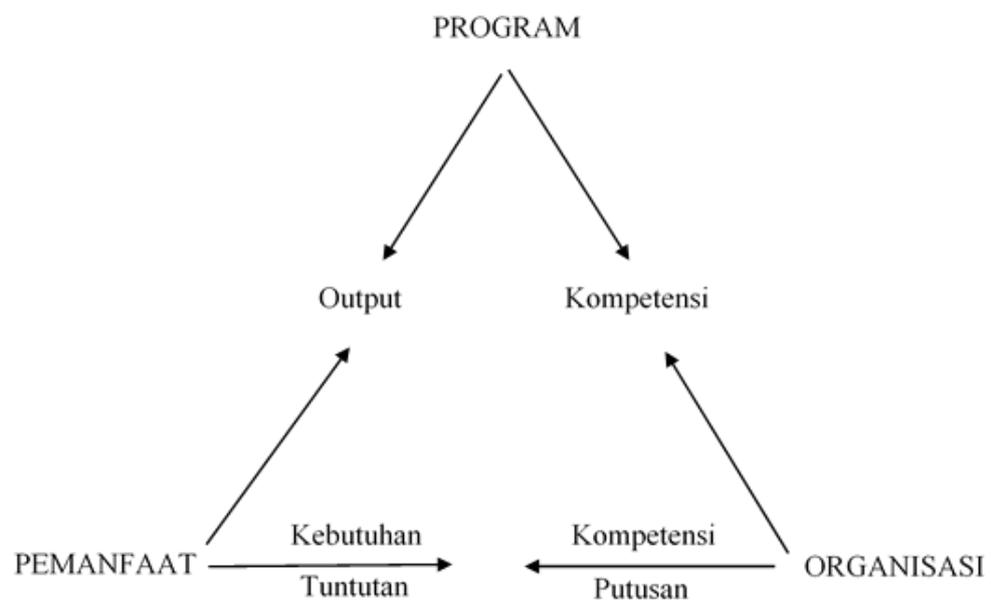
- a. Ditinjau dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah suatu pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan (*desing*),
- b. Ditinjau dari ketercapaian tujuan. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak yang dirasakan masyarakat secara individu ataupun kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran dari program tersebut.¹⁷

Salah satu model implementasi program yaitu model yang diungkapkan oleh David C. Korten. model ini menekankan pada keberhasilan program, yaitu suatu program akan berhasil jika terdapat keterkaitan antara tiga unsur. Pertama, kesesuaian program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau pemanfaat program. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang

¹⁷ Ibid., 159.

disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran atau pemanfaat. Model implementasi program ini dapat digambarkan sebagai berikut.¹⁸

Bagan 1: Model Implementasi Program Menurut David C. Korten



Berdasarkan model implementasi program David C. Korten tersebut, menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat kesesuaian dari ketiga unsur

¹⁸ Haedar Akib, "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 8–9.

implementasi program diatas maka kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Tinjauan Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Keluarga Harapan

Program menurut kamus umum bahasa indonesia didefinisikan sebagai mana berikut:

“Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha (dalam ketatanegaraan, dan perekonomian, dsb) yang akan dijalankan”.¹⁹

Sedangkan definisi keluarga menurut Hanson dan Boyd dikutip Rika Damayanti, adalah sebagaimana berikut ini:

“Keluarga adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan dihubungkan oleh kasih sayang, tanggung jawab bersama dalam jangka waktu tertentu yang dikarakteristikkan melalui komitmen, membuat keputusan bersama dan mencapai tujuan bersama”²⁰

Program keluarga harapan atau yang lebih dikenal dengan PKH merupakan suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan untuk Keluarga Miskin (PM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini merupakan usaha untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

¹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2003), 911.

²⁰ Patia Sopa, *op.cit.*, hlm. 25

Pemerintah Indonesia melaksanakan PKH sejak tahun 2007, program perlindungan sosial ini dalam dunia internasional juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT), dalam prakteknya program ini terbukti cukup mampu menanggulangi masalah-masalah kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, khususnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan kronis.²¹

Bantuan sosial PKH merupakan program berupa uang tunai kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi tingginya angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, serta mengubah pola pikir masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan²²

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut pedoman pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

- 4) Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima dana bantuan melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.

²¹ RI, “*Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*,” 9.

²² Ditjen Jaminan Sosial RI, Program Keluarga Harapan.

- 5) Meningkatkan pendapatan serta meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan.
- 6) Mengubah perilaku dan menciptakan kemandirian keluarga penerima dana bantuan PKH dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.
- 7) Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat.
- 8) Mengenalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima dana bantuan PKH²³

c. Sasaran Penerima PKH

Penerima PKH adalah keluarga yang tergolong miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, serta memenuhi kriteria komponen pendidikan, kesehatan, dana tau kesejahteraan sosial. Kriteria komponen penerima PKH terdiri dari:

- 9) Kriteria komponen pendidikan
 - a. siswa SD/MI atau sederajat
 - b. siswa SMP/MTs atau sederajat
 - c. siswa SMA/MA atau sederajat
 - d. anak usia enam sampai dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun.
- 10) Kriteria komponen kesehatan
 - a. Ibu hamil dan menyusui

²³ *Ibid.*, hlm. 25–29.

b. Anak usia 0 sampai 6 tahun

11) Kriteria komponen kesejahteraan sosial

a) Penyandang disabilitas berat

b) Warga lanjut usia mulai dari usia 60 tahun.

d. Hak dan Kewajiban Penerima PKH

Keluarga yang menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak untuk menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga berhak mendapatkan program bantuan tambahan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.²⁴

Peserta PKH memiliki empat kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, anggota keluarga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, terutama bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0-6 tahun. Kedua, anggota keluarga wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif bagi anak yang berusia wajib belajar selama 12 tahun. Ketiga, anggota keluarga harus mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

kebutuhan, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota lansia (60 tahun ke atas) dan/atau penyandang disabilitas berat. Keempat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan.²⁵

Berdasarkan kriteria komponen pendidikan, peserta PKH, yaitu anak usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA) diwajibkan terdaftar di sekolah atau jenjang pendidikan yang setara dan harus mengikuti pembelajaran di sekolah minimal 85% kehadiran.

Seluruh anggota keluarga penerima dana bantuan PKH harus memenuhi kewajiban kepersertaan PKH sebab pemenuhan kewajiban tersebut akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepersertaan lainnya. Keluarga penerima bantuan akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program jika mampu memenuhi semua kewajibannya. Sedangkan keluarga penerima dana bantuan PKH yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan penangguhan dan atau penghentian bantuan sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta PKH ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2 dan 3 jika tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan, minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27-28

- 2) Penangguhan bantuan sosial tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya.
- 3) Peserta PKH akan memperoleh kembali bantuan sosial yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajibannya.
- 4) Peserta PKH diberhentikan kepesertaanya apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan.
- 5) Peserta PKH yang diberhentikan kepesertaanya akan menerima bantuan sosial PKH yang telah ditangguhkan tahap tahap sebelumnya.²⁶

3. Tinjauan Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Pendidikan secara etimologi dalam Bahasa arab disebut *tarbiyah* yang berarti mengurus, memelihara, merawat, mendidik. Pengertian pendidikan menurut bangsa Yunani yaitu *Pedagogik* yang berarti ilmu menuntun anak, sedangkan bangsa Jerman memandang pendidikan sebagai *Erziehung* atau setara dengan *Educare* yang berarti membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. dalam Bahasa Inggris, pendidikan disebut *to educate* yang bermakna memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28-29

dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai *Panggulawentah* (pengolahan) yang berarti mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, serta mengubah perasaan anak. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata “didik” yang bermakna memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.²⁷

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 secara terminologi pendidikan didefinisikan sebagai

“..suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkannya, masyarakat, bangsa, dan negara.”²⁸

Pendidikan dalam arti luas adalah hidup, yaitu seluruh pengalaman belajar yang berlangsung di semua lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah seluruh situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.²⁹ Sedangkan Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah, yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala sesuatu yang diupayakan sekolah terhadap

²⁷ Lailanahdiya Lailanahdiya, "Pandangan Masyarakat Pedagang Kecil Tentang Pendidikan Formal Anak: Studi Masyarakat Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm. 18.

²⁸ Abdul Rahman et al., “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Np 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia,” 4, no. 1 (2021): 98–107.

²⁹ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, vol. 67 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

anak dan remaja yang dipercayakan kepada mereka agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh dalam menghadapi hubungan dan tugas-tugas social mereka nantinya.³⁰

Definisi pendidikan begitu beragam, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikannya dipengaruhi oleh latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman mereka. Berikut beberapa definisi pendidikan menurut para ahli:

Menurut Prof. Lodge (*Philosophy of Education*) pendidikan diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas semua pengalaman merupakan pendidikan. Hal ini bermakna bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di suatu lembaga pendidikan atau sekolah saja, melainkan berlangsung di setiap lingkungan kehidupan seseorang dan dalam seluruh sektor pembangunan. Dalam arti sempit pendidikan tidak berlangsung seumur hidup, melainkan berlangsung pada jangka waktu tertentu. Masa pendidikan adalah masa sekolah yang mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi.³¹

Menurut Carter V. Good, sebagaimana dikutip Ahmadi pendidikan yaitu:

- a. Seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67:6.

³¹ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2014), 31–32.

- b. Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar pengawasan dan bimbingan murid.³²

Carter V. Good juga mengartikan pendidikan sebagai:

- a. Proses perkembangan pribadi
- b. *Social proces*
- c. *Professional courses*
- d. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan dikembangkan oleh tiap generasi bangsa.³³

Pendidikan sebagai seni adalah suatu pendidikan harus berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Pendidikan sebagai profesi yaitu seorang pendidik disyaratkan memiliki keahlian atau disiplin ilmu yang spesifik. Guru yang professional adalah seorang guru yang mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendidikan sebagai pengembangan pribadi adalah pendidikan ditujukan untuk mengembangkan pribadi siswa menjadi orang yang lebih dewasa secara psikologis. Pendidikan sebagai proses sosial yaitu pendidikan mampu mendorong siswa untuk menyesuaikan diri dan saling berinteraksi dengan teman belajarnya, sehingga bisa saling belajar secara efektif. Pendidikan sebagai pelatihan professional menunjukkan bahwa seorang pendidik atau guru senantiasa

³² *Ibid.*, hlm. 35.

³³ *Ibid.*, hlm. 36.

mengembangkan profesinya melalui program pengembangan profesi keguruan.

Pendidikan menurut Langeveld adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan serta bantuan yang diberikan untuk anak-anak yang ditujukan untuk mendewasakan anak tersebut, atau membantu agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datang dari orang dewasa dan ditujukan untuk orang yang belum dewasa. John Dewey mengartikan pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Menurut J.J. Rosseau pendidikan merupakan proses pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, namun akan dibutuhkan ketika dewasa.³⁴

Pendidikan dalam arti sederhana adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman definisi pendidikan atau *pedagogie* diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang secara sengaja diterapkan oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.³⁵

³⁴ H Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 2017, 1.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa dalam perkembangan anak untuk mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menurut Andrew E. Sikula merupakan suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.³⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah suatu proses peserta didik dalam meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang akan di

³⁶ Desak Ketut Ratna Dewi et al., "Pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan," *Jurnal manajemen indonesia* 4, no. 1 (2016): 2.

³⁷ Azyumardi Azra, *Esei-esei intelektual Muslim dan pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

tempuhnya dalam melanjutkan pendidikan yang ditempuh. Tingkat pendidikan ditempuh secara manajerial atau terorganisir.

c. Tujuan Pendidikan

Tiap-tiap negara memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan pendidikan ingin dicapai negara tersebut. Berikut tujuan pendidikan menurut para ahli:

- 1) Havelock dan Huberman, pendidikan formal memiliki tujuan untuk membangun secara keseluruhan melalui tenaga kerja yang terampil.
- 2) Johan Amos Comenius, pendidikan bertujuan untuk menyiapkan diri untuk di akhirat nanti karena manusia hidup di dunia hanyalah untuk mempersiapkan kehidupan mereka di akhirat.
- 3) Danim, pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengembangkan manusia yang berpendidikan.
- 4) Muhammad Noor Syam, pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat³⁸

UNESCO menyebutkan bahwa pendidikan adalah faktor utama transformasi ke arah pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan penduduk untuk mentransformasikan visi mereka pada masyarakat kedalam realitas. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan ilmiah dan tekni, melainkan juga memberi dukungan

³⁸ Lailanahdiya, *op.cit.*, hlm 22–23.

social dan motivasi untuk menerapkannya.³⁹ Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu proses belajar dalam membuat keputusan-keputusan untuk mempertimbangkan ekologi, ekonomi, dan kesetaraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan hal tersebut mengubah mental merupakan yang paling susah, sedangkan mental pembaruan adalah kebutuhan bagi setiap bangsa yang ingin maju. Oleh sebab itu, dalam hal ini pendidikan merupakan alat penting untuk menanamkan nilai-nilai dan mengubah mental masyarakat. Tujuan pendidikan yang tertera dalam UU Nomor 2 tahun 1989, menyebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional. Yaitu:

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁴⁰

Dari pernyataan diatas, maka secara singkat tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

³⁹ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 48.

⁴⁰ UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 1)

- 2) Berbudi pekerti luhur
- 3) Memiliki kemampuan dan keterampilan
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Memiliki kepribadian yang mantab dan mandiri
- 6) Bertanggung jawab terhadap bangsa dan masyarakat.⁴¹

Allah telah menjelaskan tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an Q.S Ali Imran ayat 138-139:

 هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ


Artinya:

(Al-Qur'an) ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa (138). Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu benar-benar beriman (139).

d. Jenis-Jenis Pendidikan

Menurut Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu:⁴²

- 1) Pendidikan Formal

⁴¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 11.

⁴² Umar Tirtarahardja dan S L La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 76–79.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- a) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) ataupun bentuk lain yang sederajat.
- b) Pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Menengah Kejuruan (MAK) ataupun berbentuk lain yang sederajat.
- c) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Tabel 2: Tingkat Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Formal

1.	Tidak lebih dari sekolah dasar	SD
2.	Pernah sekolah menengah	Tidak tamat SMP
3.	Tamatan sekolah menengah	SMP
4.	Tamatan sekolah menengah atas	SMA
5.	1 sampai 3 tahun di perguruan tinggi	D1 – D2
6.	Setidaknya 4 tahun di perguruan tinggi	D3. S1, S2, dan S3

2) Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memiliki nilai, sikap keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari hari, pengaruh keluarga, serta pengaruh lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

3) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.⁴³

e. Faktor-Faktor Pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan proses mendidik dan didik, yaitu:

1) Faktor tujuan

Tujuan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, karena tanpa adanya tujuan suatu kegiatan tidak akan memiliki arti apa-apa. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang dirumuskan yang bersifat abstrak ataupun rumusan-rumusan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 79.

yang dibuat secara khusus untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Fungsi tujuan dalam pendidikan, Pertama adalah sebagai arah pendidikan, tanpa adanya upaya antisipasi (pandangan ke depan) pada tujuan, kegiatan tidak akan berjalan efisien. Tujuan tersebut akan menunjukkan arah dari suatu kegiatan atau usaha, sedangkan arah ini nantinya akan menunjukkan jarak yang harus ditempuh.⁴⁴ Sebagai contoh, seorang guru ingin membentuk siswanya menjadi seorang yang cerdas, maka arah dari usanyanya adalah menciptakan situasi belajar yang dapat mengembangkan kecerdasannya.

Kedua, tujuan sebagai titik akhir. Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, bukan pada masa sekarang atau pada jalan yang harus diambil dalam situasi tadi. Ketiga, Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Jika sebelumnya tujuan merupakan titik akhir dari usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fondamen yang menjadi alas permulaan setiap usaha. Keempat, Tujuan mampu memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan terkadang terdapat tujuan yang lebih mulia dan lebih luhur dibandingkan tujuan-tujuan

⁴⁴ Hasbullah, *op.cit.*, hlm. 12.

lainnya. Semua itu akan terlihat jika berdasarkan nilai-nilai tertentu.⁴⁵

2) Faktor Pendidik

Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Seorang pendidik harus memperlihatkan bahwa dirinya mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia harus mampu membentuk dirinya sendiri yang tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak didiknya namun juga terhadap dirinya sendiri. Tanggungjawab ini didasarkan atas kebebasan yang ada pada dirinya untuk memilih perbuatan yang terbaik menurutnya. Apa yang dilakukannya menjadi tauladan bagi masyarakat.

3) Faktor Anak Didik

Secara umum, anak didik adalah individu yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang memberikan pendidikan. Secara lebih khusus, anak didik merujuk pada anak-anak yang belum dewasa yang ditempatkan di bawah tanggung jawab pendidik. Anak didik memegang peranan penting dalam proses pendidikan dan berada dalam lingkungan pendidikan. Mereka menjadi komponen yang esensial dalam proses tersebut.⁴⁶

4) Faktor Alat Pendidikan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.⁴⁷

5) Faktor Lingkungan

Lingkungan atau *environment* meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan seseorang, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan organisasi pemuda.⁴⁸

f. Islam memandang Pendidikan

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu senantiasa diberikan derajat yang tinggi diantara orang-orang yang beriman sebagaimana ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.26.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan sebagaimana berikut ini:

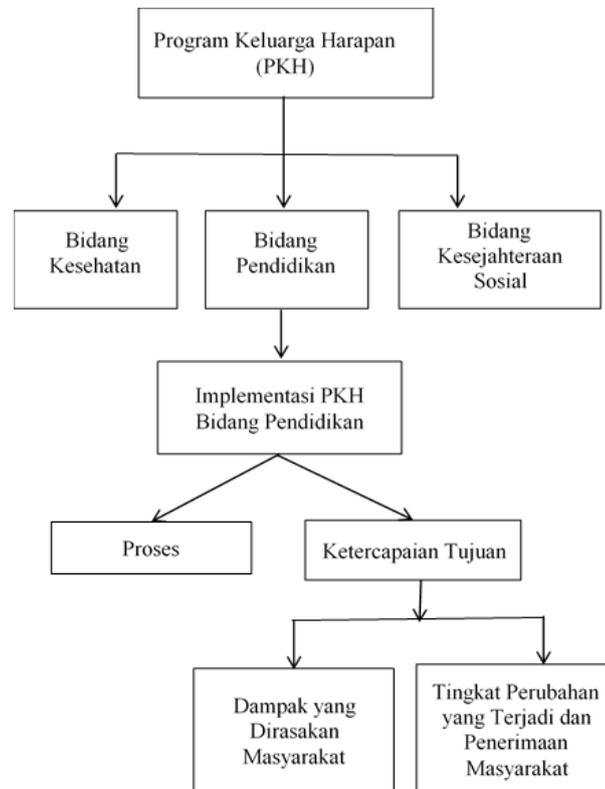
حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرَأُ مِنَّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتَرُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا يَتَّخِذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami orang yang biasa mengajari kami, yakni dari kalangan sahabat Nabi SAW, bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya mereka (para sahabat) pernah mempelajari sepuluh ayat (Al-Qur’an) dari Rasulullah SAW. Mereka tidak mempelajari sepuluh ayat yang lain sebelum mereka dapat mengetahui setiap ilmu yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya.” (HR. Ahmad)

B. Kerangka Berpikir

Dalam rangka mengukur kerangka berpikir yang sistematis, maka penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana berikut ini:

Bagan 2: Kerangka Berpikir



Kerangka di atas sesungguhnya menjelaskan bahwa program PKH dijalankan berdasarkan prinsip hirarkis yang begitu jelas. Tiga bidang implementasi PKH di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berfokus pada bidang pendidikan. Melalui pengamatan mendalam terhadap proses dan ketercapaian tujuan penelitian ini berusaha mengamati dampak dan tingkat perubahan dari implementasi PKH di masyarakat Maduretno. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana program PKH diimplementasikan dalam bidang pendidikan di masyarakat

Maduretno. Hal ini melibatkan pengumpulan data mengenai aspek-aspek seperti akses pendidikan, partisipasi anak-anak dalam pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perubahan yang terjadi dalam tingkat pendidikan dan kesadaran pendidikan di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan tulisan yang berasal dari pengamatan terhadap individu dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini.⁴⁹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif pertanyaan yang diajukan lebih bersifat radikal dan untuk mendapatkan jawabannya memerlukan analisis yang luas. Kompleks, serta mendalam dari berbagai sudut.⁵⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan, penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Jika sedang diimplementasikan maka bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut, sedangkan jika penelitian kebijakan tersebut dilaksanakan ketika kebijakan tersebut sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan maka bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh.⁵¹ Jenis penelitian kebijakan dipilih untuk

⁴⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Cetakan Ke (Bandung: Refika Aditama, 2012), 44.

⁵⁰ Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Metodologi dan aplikasi riset pendidikan* (Bumi Aksara, 2022), 123.

⁵¹ Nusa Putra dan Hendrawan, *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 28.

memperoleh informasi mengenai implementasi PKH dan hasil PKH dalam meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

B. Setting Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti sebagai alat pengumpul data yang utama.⁵² Hal ini berarti peneliti harus hadir di lapangan yang berada di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini peneliti secara intensif mengamati kegiatan dan aktifitas sasaran dalam proses kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga peneliti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara yang diperlukan mengenai implementasi PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat serta hasil PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Dalam konteks pengamat dalam sebuah observasi, perannya terbatas sebagai pemeran dan pengamat. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan kritik atau masukan terhadap apa yang sedang diamati. Sebagai pengamat, tugas utamanya adalah melakukan pengamatan secara pasif. Pengamat dalam hal ini tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, sehingga mereka tetap menjaga keterpisahan dan netralitas. Peran pengamat tersebut mirip dengan apa yang disebut oleh Lexy Moleong sebagai "pemeran dan pengamat". Dalam konteks ini, pengamat sebagai anggota tim

⁵² Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, 186.

penelitian tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan bertugas untuk melakukan pengamatan. Namun, peran pengamat semacam ini juga memiliki keterbatasan. Mereka tidak dapat memberikan masukan atau kritik terhadap apa yang diamati, dan terkadang hal ini dapat menghalangi pengumpulan data yang sangat penting, terutama jika ada informasi rahasia yang harus disampaikan oleh subjek yang diamati. Dalam observasi yang dilakukan oleh pengamat semacam ini, perlu diperhatikan bahwa data yang dikumpulkan hanya bersifat pengamatan pasif, tanpa adanya intervensi langsung dari pengamat.⁵³

Penelitian ini dilakukan di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini peneliti secara intensif mengamati kegiatan dan aktifitas sasaran dalam proses kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga peneliti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara yang diperlukan mengenai implementasi PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat serta hasil PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Setting penelitian merupakan hal yang penting pada suatu penelitian karena menyangkut pencarian data-data yang diperoleh dalam penelitian. Penetapan lokasi penelitian dalam kajian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian berada di Desa Maduretno, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Pemilihan

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021). hlm. 174

lokasi ini dikarenakan pada lokasi tersebut banyak kasus anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja serta tingginya jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Desa Maduretno merupakan sebuah desa yang terklasifikasikan sebagai daerah pedesaan dengan luas 150 Ha. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yakni Dusun Cengkirejo, Dusun Slambur Kidul dan Dusun Maduretno itu sendiri. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Srikaton, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngampel, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Desa Papar.

C. Sumber Data

Data merupakan bahan yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta sehingga dapat memberi manfaat bagi peneliti atau memberi gambaran kepada peneliti tentang kondisi atau suatu keadaan. Sumber data adalah semua informasi baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁵⁴

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada subjek penelitian, yakni kepada penerima bantuan PKH, pendamping PKH, serta Kepala Desa Maduretno.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 5.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan dari penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁵⁵ Dalam penelitian ini wawancara dipilih untuk mengetahui pikiran, motif dan pengalaman informan mengenai implementasi PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana hanya pokok-pokok masalah yang disiapkan, sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat melakukan wawancara, sehingga pertanyaan yang ditanyakan tidak sama persis untuk setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar

⁵⁵ Moleong, *op.cit.*, hlm. 174.

cakupan topik yang luas.⁵⁶ Dalam penelitian ini informan atau pihak yang diwawancarai adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH, Pendamping PKH, dan Kepala Desa Maduretno.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengaati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.⁵⁷ Peneliti mengobservasi bagaimana implementasi PKH dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Maduretno.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa keterangan serta laporan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian untuk ditelaah.⁵⁸ Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya profil Desa Maduretno, data kependudukan, data pendidikan, data penerima PKH serta data-data lain yang mendukung penelitian.

⁵⁶ Suharsaputra, *op.cit.*, hlm. 214.

⁵⁷ Moleong, *op.cit.*, hlm. 174.

⁵⁸ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 113.

E. Analisis Data

Dalam konteks penelitian PKH di Desa Maduretno, teknik penelitian yang digunakan adalah Analysis Interactive Model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁹

Pertama, dalam langkah pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data baik dalam bentuk data primer maupun sekunder. Data tersebut dikategorikan berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Kedua, langkah reduksi data, peneliti melakukan analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang dianggap tidak relevan. Data penelitian yang telah direduksi digabungkan dalam kalimat-kalimat sederhana untuk kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan laporan penelitian.

Ketiga, adalah langkah penyajian data, informasi yang telah dikumpulkan disajikan melalui narasi dalam laporan penelitian. Data-data yang memiliki makna dapat dikelompokkan dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Misalnya, hasil wawancara dengan kepala desa dan pendamping desa maupun penerima manfaat, disajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan memperhatikan topik penelitian.

⁵⁹ *ibid.*, hlm 114

Keempat, adalah langkah penarikan kesimpulan, hasil temuan penelitian disajikan dan diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahapan ini, temuan awal penelitian yang sebelumnya mungkin belum jelas dapat menjadi lebih jelas dan kredibel melalui penyajian temuan penelitian yang sistematis.

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, penelitian Implementasi PKH di Desa Maduretno dapat menyusun laporan penelitian yang rinci, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Model Analysis Interactive Model membantu peneliti dalam mengorganisasi data, menganalisis temuan, dan menyajikan hasil penelitian dengan cara yang jelas dan terstruktur.

F. Keabsahan Data

Dalam rangka memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, penting dilakukan pengecekan yang melibatkan kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriteria yang digunakan adalah derajat kepercayaan atau *credibility*.⁶⁰

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti hendaklah berusaha mendapatkan informasi yang valid dan mengujinya, untuk itu diperlukan suatu pengecekan data oleh peneliti untuk menguji hasil penelitian. Untuk mendapatkannya diperlukan teknik pemeriksaan dalam menguji validitas suatu

⁶⁰ Moleong, *op.cit.*, hlm. 177.

data. Menurut Octaviani ada setidaknya empat teknik pemeriksaan yang diperlukan:⁶¹

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan oleh teman sejawat.

Triangulasi: Teknik ini melibatkan penggunaan beberapa sumber data atau metode yang berbeda untuk mengonfirmasi temuan yang diperoleh.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan data dari berbagai sumber atau melibatkan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Dengan menggabungkan berbagai sumber data, peneliti dapat memastikan konsistensi dan validitas temuan yang diperoleh.

Ketekunan Pengamatan: Dalam penelitian observasional, penting bagi peneliti untuk memastikan ketekunan dalam melakukan pengamatan.

Hal ini melibatkan kehadiran yang konsisten dan lamanya waktu pengamatan. Dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak terlewatkan informasi penting.

Pengecekan Teman Sejawat: Setelah data dikumpulkan, penting untuk melibatkan pengecekan oleh teman sejawat atau rekan peneliti lainnya.

⁶¹ Rika Octaviani dan Elma Sutriani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data” (INA-Rxiv, 2019).

Dengan melibatkan orang lain yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang serupa, dapat dilakukan tinjauan dan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan. Pengecekan teman sejawat dapat membantu mengidentifikasi potensi kekeliruan atau bias dalam interpretasi data, serta memberikan perspektif tambahan terhadap hasil penelitian. Dengan menerapkan kriteria-kriteria pengecekan keabsahan data seperti teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan teman sejawat, penelitian dapat mengurangi risiko kekeliruan atau bias dalam interpretasi data. Hal ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat diandalkan dan temuan yang dihasilkan memiliki keabsahan yang tinggi. Dalam hal ini peneliti melaksanakan kegiatan observasi dengan mendalam dan berkelanjutan di Desa Maduretno, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Sedangkan triangulasi merupakan teknik pengecekan dengan menggunakan data relevan yang lain untuk membantu upaya pengecekan keabsahan data, dalam hal ini upaya membandingkan data satu dengan satu yang lain dilakukan seperti analisis terhadap hasil wawancara satu dengan hasil wawancara yang lain. Sedangkan diskusi teman sejawat merupakan tahapan pengecekan dengan melakukan diskusi mendalam dengan teman sejawat dalam rangka merumuskan hasil sementara maupun hasil penelitian, tahap ini dilaksanakan untuk membantu merumuskan klasifikasi hasil penelitian yang dilakukan.

2. Keteralihan (*tranferbility*)

Teknik ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian ini dapat diterapkan dalam kasus yang lain. dalam konteks transferabilitas, hasil penelitian PKH di Desa Maduretno dapat menjadi acuan atau referensi untuk kasus serupa di desa-desa lain. Transferabilitas ini bergantung pada pemakai atau pembaca hasil penelitian. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk membuat laporan yang rinci, sistematis, dan jelas tentang metodologi penelitian, temuan, dan kesimpulan yang dihasilkan. Dengan laporan yang terperinci, pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian di Desa Maduretno dapat diaplikasikan atau relevan dalam konteks kasus yang lain. Selain itu, kriteria pengecekan keabsahan data yang telah dijelaskan juga berperan dalam menjaga tingkat kepercayaan hasil penelitian. Dalam penelitian PKH di Desa Maduretno, peneliti dapat menerapkan teknik triangulasi dengan menggabungkan berbagai sumber data, seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen, untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, ketekunan pengamatan juga penting untuk memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, peneliti PKH di Desa Maduretno dapat menghasilkan laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara kepercayaan dan relevan untuk kasus penelitian serupa di tempat lain. Hal ini memberikan kemungkinan bagi pembaca atau pemakai hasil penelitian untuk

mengevaluasi dan mengaplikasikan temuan tersebut dalam konteks yang relevan.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Teknik ini dilakukan dengan memerhatikan audit terhadap seluruh proses penelitian. Audit penelitian biasanya dilakukan oleh tim independen atau pembimbing yang bertugas untuk mengevaluasi validitas dan keandalan hasil penelitian. Jika peneliti tidak dapat memberikan bukti atau tidak mampu menunjukkan aktivitas yang dilakukan dalam penelitiannya, maka hasil penelitian tersebut patut diragukan. Dengan adanya audit penelitian, aspek dependabilitas atau kepercayaan terhadap penelitian dapat diuji secara obyektif. Audit ini dapat memeriksa apakah proses penelitian dilakukan dengan benar, metode yang digunakan sesuai, data yang diperoleh valid, dan kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang kuat.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Teknik ini adalah turunan dari teknik dependabilitas sebelumnya, yang melibatkan pengujian terhadap hasil penelitian. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maduretno, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penelitian yang dilakukan memiliki fungsi yang sesuai, maka penelitian tersebut dapat dianggap memenuhi standar *confirmability* atau kekonfirmasiannya. Dalam hal ini, *confirmability* mengacu pada kemampuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang proses pelaksanaan program PKH di Desa Maduretno.

Dengan menguji hasil penelitian dan memastikan bahwa proses penelitian yang dilakukan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, peneliti dapat memastikan bahwa temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dikonfirmasi atau dipercaya. Untuk mencapai *confirbility* dalam penelitian PKH di Desa Maduretno, peneliti perlu menjaga integritas dan transparansi dalam melaporkan proses penelitian secara rinci. Hal ini akan memungkinkan auditor atau pihak yang mengevaluasi untuk memverifikasi dan memahami dengan jelas langkah-langkah yang telah dilakukan, serta memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat diandalkan. Dengan mengimplementasikan teknik *confirbility*, peneliti dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pada hasil penelitian PKH di Desa Maduretno dan memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar validitas dan keandalan (*confirbility*).

G. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hendaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh.

1. Tahap Pra Penelitian

Adapun dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian, rancangan penelitian ini berupa proposal penelitian. Pada tahap ini peneliti memilih lapangan penelitian,

pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, menentukan latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian.

- b. Memilih lokasi penelitian, dalam pemilihan lokasi penelitian peneliti melihat permasalahan yang ada di masyarakat.
- c. Mengurus perizinan dari universitas, Bangkesbangpol, kecamatan, serta desa tempat penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengunjungi kantor desa untuk meminta data masyarakat Desa Maduretno, data Program Keluarga Harapan, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk penelitian.
- b. Melakukan wawancara dengan pendamping PKH
- c. Melakukan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
- d. Melakukan wawancara dengan kepala desa

3. Tahap Penyusunan Laporan

Langkah terakhir dalam kegiatan penelitian adalah pelaporan penelitian.

Dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan penelitian.

Tabel 3: Jadwal Penelitian

No	Waktu kegiatan	Nama kegiatan
1	September 2020	Pengajuan dan konsultasi judul proposal penelitian kepada dosen pembimbing
2	Maret 2023	Penyajian laporan penelitian dan Bimbingan penulisan proposal penelitian dengan dosen pembimbing
3	April - Mei 2023	Pelaksanaan penelitian di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan penyusunan hasil penelitian.
4	Juni 2023	Pelaksanaan ujian/sidang penelitian

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Maduretno
 - a. Sejarah Singkat Desa Maduretno

Desa Maduretno merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Desa Maduretno awalnya merupakan wilayah tidak berpenghuni. Dahulu wilayah ini banyak ditumbuhi pepohonan besar dan lebat serta memiliki suhu yang dingin. Kemudian wilayah ini didatangi oleh para pengungsi dari kerajaan Mataram yang sedang berperang melawan pemerintah kolonial Belanda. Para pengungsi dari kerajaan Mataram kemudian membuka lahan ini untuk tempat persembunyian mereka. Seiring dengan berkembangnya waktu wilayah ini berkembang menjadi wilayah pemukiman dan lahan pertanian.

Asal mula nama Desa Maduretno dahulu diambil karena banyak putri cantik dan manis yang tinggal di desa ini, maka masyarakat menyebutnya dengan istilah “MADU” yang berarti manis serta “RETNO” yang berarti wanita. Sejak saat itu, nama tersebut dijadikan *tetenger* (penanda) sebagai nama desa yaitu Desa Maduretno.⁶²

⁶² Laporan Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025

b. Visi Misi dan Tujuan

1) Visi

Visi pemerintah Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah “Terwujudnya Desa Maduretno yang jujur, disiplin, sejahtera, dan berakhlak.”

2) Misi

Misi pemerintah Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik, mengandung arti penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintahan desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan atau organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat dan swasta agar pembangunan di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri mampu menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi, mempunyai integrasi dan jati diri tinggi yang dipandu oleh nilai nilai yang luhur berbudaya dan beragama.⁶³

c. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Maduretno merupakan salah satu dari 17 desa / kelurahan di Kecamatan Papar yang terletak di tengah wilayah Kecamatan Papar. Luas wilayah pemukiman Desa Maduretno adalah 15 Ha, terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Maduretno, Dusun Slambur Kidul, dan Dusun Cengkirejo.

Tabel 4: Batas-batas Wilayah Desa Maduretno

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Srikaton	Purwoasri
2.	Sebelah Selatan	Papar	Kayenkidul
3.	Sebelah Timur	Ngampel	Plemahan
4.	Sebelah Barat	Papar	Ngronggot

Luas wilayah Desa Maduretno sebagian besar merupakan wilayah persawahan, yakni seluas 88 Ha. Wilayah tegalan seluas 39 Ha, wilayah rawa-rawa seluas 23 Ha, wilayah sekolah seluas 1 Ha, wilayah perkantoran seluas 0,5 Ha, serta sisanya merupakan wilayah pemukiman seluas 15 Ha.

⁶³ Laporan Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025

d. Lokasi

Desa Maduretno merupakan salah satu dari 17 desa / kelurahan di Kecamatan Papar yang terletak di tengah wilayah Kecamatan Papar. Luas wilayah pemukiman Desa Maduretno adalah 15 Ha, terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Maduretno, Dusun Slambur Kidul, dan Dusun Cengkirejo.

Tabel 5: Batas-batas Wilayah Desa Maduretno

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Srikaton	Purwoasri
2.	Sebelah Selatan	Papar	Kayenkidul
3.	Sebelah Timur	Ngampel	Plemahan
4.	Sebelah Barat	Papar	Ngronggot

Luas wilayah Desa Maduretno sebagian besar merupakan wilayah persawahan, yakni seluas 88 Ha. Wilayah tegalan seluas 39 Ha, wilayah rawa-rawa seluas 23 Ha, wilayah sekolah seluas 1 Ha, wilayah perkantoran seluas 0,5 Ha, serta sisanya merupakan wilayah pemukiman seluas 15 Ha.

Gambar 1: Desa Maduretno dalam Peta

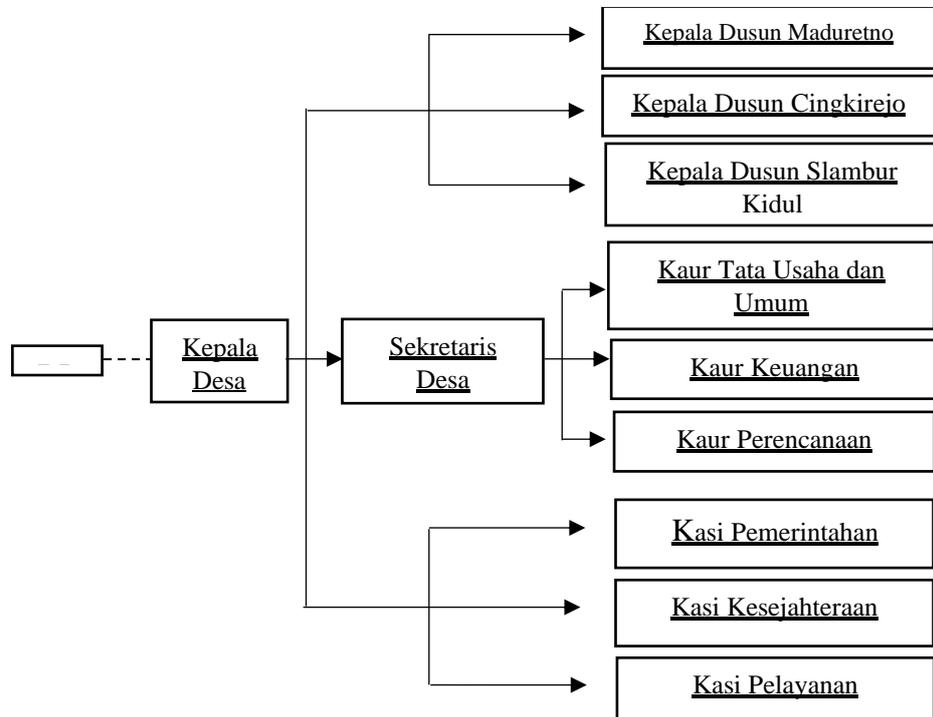


e. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Desa Maduretno diatur dan dilaksanakan oleh aparatur desa yang bertugas mengurus seluruh kepentingan penduduk desa. Desa Maduretno sekarang dipimpin oleh Bapak Siawanto selaku kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Maduretno⁶⁴:

⁶⁴ *Ibid.*,

Bagan 3: Struktur Organisasi Desa Maduretno



f. Kondisi Penduduk Desa Maduretno

1) Jumlah Penduduk

Desa Maduretno merupakan desa yang terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Slambur Kidul, Dusun Cengkirejo, dan Dusun Maduretno. Pada setiap dusun di desa Maduretno diorganisasikan menjadi rukun warga (RT) dan rukun tetangga (RW). Dusun Slambur Kidul dibagi menjadi 2 RW dan 4 RT, Dusun Cengkirejo dibagi menjadi 1 RW dan 4 RT, Dusun Maduretno Dibagi menjadi 1 RW dan 4 RT. Kepadatan

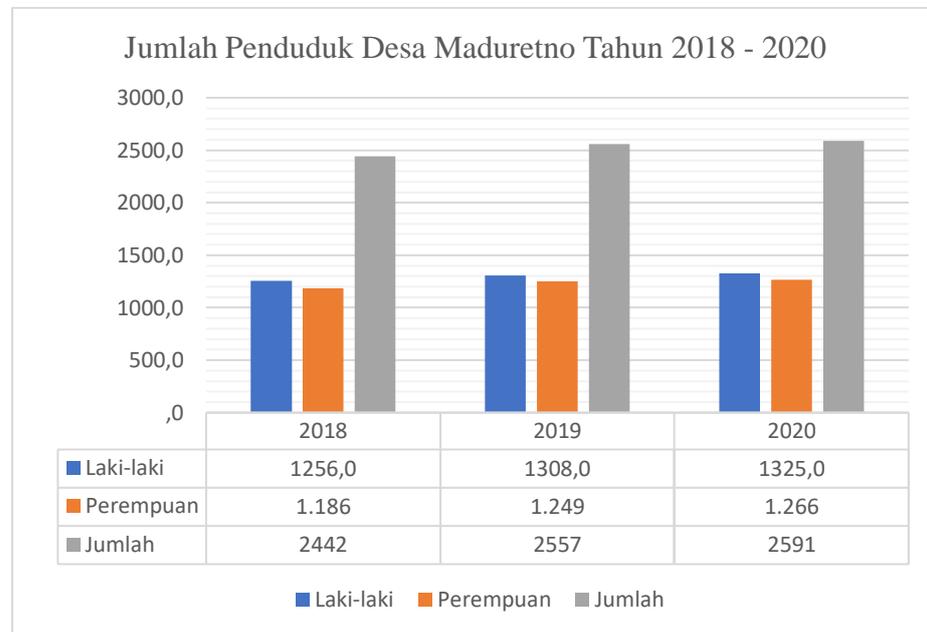
penduduk desa sebesar 1.704 per kilometer dengan total kepala keluarga sebanyak 838.⁶⁵

Jumlah penduduk pada tahun 2018 tercatat sebanyak 2.442 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.256 jiwa dan perempuan sebanyak 1.186 jiwa, tahun 2019 tercatat sebanyak 2.557 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.308 jiwa dan perempuan sebanyak 1.249 jiwa. Tahun 2020 tercatat sebanyak 2.591 jiwa yang terdiri dari 1.325 penduduk laki-laki dan 1.266 penduduk perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Maduretno pada tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan.⁶⁶

⁶⁵ Daftar Isian Potensi Desa Maduretno

⁶⁶ Daftar isian tingkat perkembangan Desa Maduretno

Grafik 1: Grafik Jumlah Penduduk



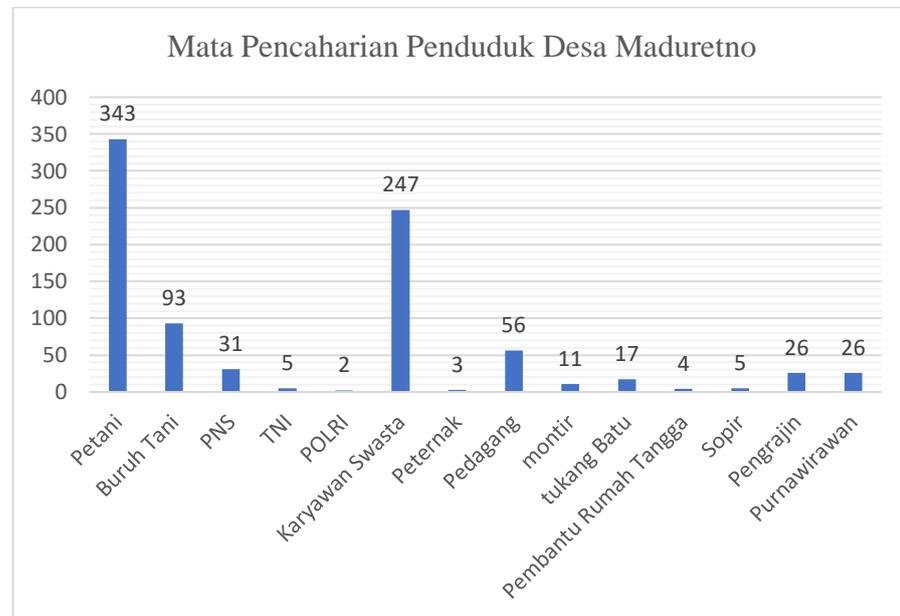
2) Kondisi Ekonomi

Luas wilayah Desa Maduretno sebagian besar merupakan lahan persawahan, yakni seluas 88 Ha. Besarnya lahan persawahan tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian. Masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 343 dan yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 93. Selain bekerja di sektor pertanian banyak dari masyarakat Desa Maduretno yang memilih merantau ke kota-kota besar untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di desa.

Selain bekerja sebagai petani, buruh tani dan karyawan swasta sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, peternak,

Pegawai Negeri Sipil, pengrajin, sopir, dan lain-lain. Berikut adalah grafik mata pencaharian penduduk Desa Maduretno:

Grafik 2: Mata Pencaharian Penduduk



Tabel 6: Kesejahteraan Masyarakat

No.	Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah (KK)
1.	Keluarga Pra-sejahtera	21
2.	Keluarga Sejahtera I	66
3.	Keluarga Sejahtera II	390
4.	Keluarga Sejahtera III	313
5.	Keluarga Sejahtera Plus	48

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Maduretno cukup rendah dimana terdapat 21 kepala keluarga yang tergolong dalam keluarga pra-sejahtera, 66 kepala keluarga tergolong dalam keluarga sejahtera I, 390 kepala keluarga tergolong dalam keluarga sejahtera II, 313 kepala keluarga tergolong

dalam keluarga sejahtera III, dan 48 keluarga tergolong dalam keluarga sejahtera plus.⁶⁷

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Maduretno disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada sehingga masyarakat hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian. Selain itu, ada pula kepala keluarga yang memilih untuk merantau ke kota-kota besar di luar guna mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan keinginan atau keahlian mereka, misalnya mereka yang ingin berprofesi sebagai karyawan perusahaan.

2. Kondisi Pendidikan Desa Maduretno

Tingkat pendidikan terakhir rata-rata masyarakat Desa Maduretno secara umum berada pada jenjang SLTP/Sederajat. Kondisi ini nampaknya menyulitkan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang mapan di kemudian hari. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang besar, nyatanya mereka lebih memilih bekerja sebagai petani, buruh, ataupun karyawan swasta dengan pendapatan yang tidak seberapa. Situasi demikian membuat mereka kerap kali terlihat bersusah payah untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, masih ada anak yang mengalami putus sekolah di Desa Maduretno. Setidaknya, tercatat sebanyak 15 anak yang terpaksa berhenti sekolah dalam kurun waktu tiga

⁶⁷ *Ibid.*, daftar isian tingkat perkembangan

tahun belakangan (2018-2020). Enam diantaranya hanya sampai di jenjang SD/MI, sedangkan sisanya yakni sembilan orang terhenti di jenjang SMP/ sederajat. Untuk memperjelas rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana yang terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7: Angka Anak Putus Sekolah di Desa Maduretno

Tahun	Angka Putus Sekolah	Jenjang Pendidikan Terakhir	
		SD/MI	SLTP/ sederajat
2018	7	3	4
2019	5	1	4
2020	3	2	1
Jumlah		6	9

Ketidakmampuan orang tua dalam membayar biaya pendidikan diyakini menjadi faktor kunci yang melatarbelakangi mengapa masih terdapat anak yang putus sekolah di Desa Maduretno. Mahalnya biaya pendidikan memang menjadi persoalan krusial hari ini di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari *stakeholder* terkait. Meskipun demikian, masih ada beberapa diantara mereka yang bisa lanjut sekolah bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi, tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Maduretno perlu menjadi prioritas bagi pemerintah setempat. Banyak program yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Desa untuk membantu masyarakatnya, salah satunya lewat pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di bidang pendidikan. Melalui program ini diharapkan mampu meringankan biaya per-kepala keluarga

agar bisa menyekolahkan anak-anak mereka minimal sampai jenjang SLTA/ sederajat.

Tabel 8: Kepala Desa Maduretno

No.	Nama	Tahun
1.	Liwon Kromo Harjo	1989 - 1999
2.	Sutjipto	1999 - 2007
3.	Winarsih	2007 - 2013
4.	Karyanto	2013 - 2019
5.	Siswanto	2019 - 2025

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Berdasarkan penelitian di lapangan implementasi program keluarga harapan dilaksanakan di Desa Maduretno dilaksanakan dengan prinsip-prinsip mendasar sebuah kebijakan. Seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut akan dijelaskan masing-masing proses implementasi tersebut:

a) Komunikasi

Menurut keterangan dan hasil wawancara di lapangan salah satu langkah dalam implementasi program dilaksanakan dengan prinsip komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan dengan proses sosialisasi program PKH kepada masyarakat hal ini disampaikan dalam salah satu petikan wawancara dengan Kepala Dea Maduretno Bapak Siswanto berikut ini:

“Sosialisasi awal dari Program Keluarga Harapan dilaksanakan di balai desa dengan mengundang seluruh KPM. Pada pertemuan awal ini membahas mengenai hal-hal pokok PKH seperti tujuan PKH, hak dan kewajiban KPM, serta sanksi jika KPM tidak melakukan tugasnya. Selain itu, juga ada pertemuan kelompok yang dilakukan sebulan sekali. Kalau pertemuan kelompok ini dilakukan di rumah ketua kelompok PKH dan dilaksanakan langsung oleh pendamping PKH.”⁶⁸

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Febri selaku Pendamping PKH dalam salah satu wawancara disebutkan sebagaimana berikut:

"Pertama, kami melakukan identifikasi sasaran, mbak. Identifikasi ini sifatnya adalah validasi karena kami sudah mengantongi data-data penerima PKH tersebut melalui penetapan anggota. Kami memverifikasi informasi yang ada untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya, kami memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diberikan oleh keluarga, seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Kartu Penerima Program PKH”

Proses identifikasi sasaran PKH diawali dengan verifikasi data yang sudah ada untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan oleh keluarga penerima manfaat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat PKH. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh keluarga dengan persyaratan yang telah ditetapkan, seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Siswanto Kepala Desa Maduretno, tanggal 20 Maret 2023.

Melalui validasi ini, tim Pendamping PKH dapat memastikan bahwa keluarga-keluarga yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Validasi juga membantu dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan program atau penerimaan yang tidak tepat.

Beberapa penerima PKH juga membenarkan proses sosialisasi dan identifikasi ini sebagaimana ibu Suwarti selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan:

“Iya, ada pertemuan dengan pendamping PKH di rumah ketua kelompok PKH setiap bulan dan ada juga pertemuan di balai desa. Selain itu, juga ada grup whatsapp-nya untuk informasi-informasi seperti tanggal pencairan dana bantuan dikirimkan melalui grup whatsapp.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas, proses perencanaan dijalankan melalui dua model yaitu sosialisasi dan identifikasi. penyampaian informasi tentang Program Keluarga Harapan di Desa Maduretno sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH melalui pertemuan awal dengan adanya sosialisasi kepada seluruh KPM, pertemuan bulanan, serta komunikasi melalui grup *whatsapp*.

Namun, kejelasan informasi yang disampaikan masih kurang baik, hal ini dilihat dari adanya KPM yang tidak mengetahui jumlah dana bantuan yang mereka terima.

b) Sumber Daya

Salah satu indikator implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik adalah ketersediaan sumber daya dalam sebuah kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan bagian penting berjalannya sebuah implementasi keluaran kebijakan.⁶⁹ Pelaksanaan penyaluran PHK pertama-tama dilakukan dengan pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pendataan. Bapak Siswanto selaku Kepala Desa mengutarakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendataan keluarga yang kurang mampu dan mensosialisasikan program ini ke masyarakat, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Kita ada tim yang bertugas khusus mendata keluarga yang kurang mampu langsung dari Kecamatan. Pendataan ini bertujuan agar bantuan sosial yang didapat memang tepat sasaran”

Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa hasil dari pendataan keluarga yang kurang mampu akan di bawa ke tingkat Kabupaten untuk dikoordinasikan bersama:

“Hasilnya nanti akan dibawa bawa untuk di koordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dari Kabupaten. Disitulah nanti akan diputuskan secara bersama apakah

⁶⁹ Syahrul Mubarak et al., “Policy implementation analysis: exploration of george edward iii, marilee s grindle, and mazmanian and sabatier theories in the policy analysis triangle framework,” *JPAS (Journal of Public Administration Studies)* 5, no. 1 (2020): 33–38.

program ini memang layak di dapat oleh mereka yang telah kita data. Jadi ya ngga bisa ujuk-ujuk mbak.... kita ngikuti prosedurnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, implementasi dari program PKH di Desa Maduretno telah memenuhi kriteria pertama dari elemen sumber daya. Pemerintah Desa Maduretno secara tegas menyatakan bahwa memang ada orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan program ini.

Terlepas dari hasil keputusan yang didapat, setidaknya pihak pemerintah Desa Maduretno telah berupaya secara maksimal untuk membuka peluang bagi masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

c) Disposisi

Disposisi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi adalah sikap, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh para pelaku atau *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan publik. Unsur ini berkaitan erat dengan seberapa tinggi tingkat sensitifitas para *stakeholder* kebijakan terhadap persoalan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Artinya, keberhasilan kebijakan publik itu bergantung pada sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang dimiliki oleh para *stakeholder* terkait.

Unsur disposisi ini tercermin dari kepekaan setiap *stakeholder* pelaksana kebijakan di Lapangan hal ini terlihat misalnya melalui pertemuan kelompok yang dilaksanakan untuk memberikan informasi

mengenai tata tertib dan aturan Program Keluarga Harapan. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai pola pengasuhan dan pendidikan anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Siti Maimunah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH:

“saat pertemuan dengan pendamping yang sebulan sekali itu, pendamping PKH menjelaskan tentang aturan-aturan dari PKH dan juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengasuh dan pendidik anak yang baik.”

Penyampaian informasi Program Keluarga Harapan di desa Maduretno sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan PKH dari dinas sosial, yaitu melalui sosialisasi awal serta pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui pertemuan rutin setiap bulan.

Informasi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus jelas dan tidak membingungkan. Penyampaian informasi yang kurang jelas dapat mengganggu proses implementasi. Penyampaian informasi tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Maduretno belum dapat memberikan kejelasan kepada seluruh KPM dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak seluruh KPM mengetahui jumlah dana bantuan PKH yang diterima. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Nur Aisyah selaku KPM dengan komponen anak sekolah tingkat SD, sebagai berikut:

“kalau anak saya yang SD itu dapat sekitar Rp. 250.000 setiap tiga bulan sekali.”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Siti Maimunah selaku KPM dengan komponen anak sekolah tingkat SD, ibu Sumiati

selaku KPM dengan komponen anak sekolah jenjang SLTP menyatakan sebagai berikut:

“waktu penyalurannya itu tiga bulan sekali, kalau jumlah uang yang saya terima itu Rp. 200.000.”

Hal lain juga disampaikan oleh ibu Sulami selaku KPM dengan komponen anak usia SD dan SLTA, sebagai berikut:

“saya kurang tahu pasti dapat berapa, kayaknya sekitar Rp. 650.000. tapi pernah juga dapat satu juta lebih karena saat periode sebelumnya tidak ada pencairan dana, maka pada periode selanjutnya dapat dobel.”

Kendati unsur disposisi dapat dijalankan dengan baik. Namun pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Di desa Maduretno tentang jumlah dana bantuan yang diterima agaknya masih kurang baik. KPM tidak mengetahui pasti jumlah dana bantuan PKH yang mereka terima. Kurangnya pemahaman KPM tersebut dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan dana Bantuan PKH di Desa Maduretno.

d) Struktur Birokrasi

Para *Stake holder* PKH di Desa Maduretno menunjukkan manajemen struktur birokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi yang baik. Pelaksanaan program PKH dan implementasi di lapangan melibatkan struktur birokrasi dari tingkat hirarki yang paling tinggi.

Kepala Desa, Pendamping PKH dan *stake holder* di lapangan terlihat bekerja dengan cukup maksimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. Beberapa *stake holder* yang ditugaskan turun langsung ke lapangan dalam memberikan sosialisasi, identifikasi, dan pelaksanaan program terhadap warga. Keterlibatan mereka sesungguhnya menunjukkan implementasi kebijakan di lapangan dapat dijalankan dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Febri selaku pendamping PKH berikut:

“Ya mbak, saya langsung turun ke rumah warga jika ada warga yang kurang paham mengenai program ini, kami mencatat evaluasi setiap tahun juga berkaitan dengan pelaksanaannya di lapangan, jadi itu dijadikan landasan kita untuk kebijakan PKH di tahun-tahun selanjutnya”

Terlihat bahwa dari hasil wawancara di atas, para penanggung jawab program ini menjalankan dan mengimplementasikan program PKH dengan prinsip-prinsip transparansi dan kebijakan yang baik. Struktur birokrasi yang dijalankan dengan jelas dan sistematis.

Struktur birokrasi yang jelas dan sistematis memungkinkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk penanggung jawab program, staf desa, dan masyarakat. Di dalam struktur birokrasi desa Maduretno, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program PKH.

Setiap pihak memiliki peran yang spesifik dalam memastikan kelancaran program, mulai dari pendataan dan pemilihan penerima

manfaat hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, desa Maduretno juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program PKH. Para penanggung jawab program menyatakan bahwa mereka turun langsung ke rumah warga yang kurang paham mengenai program ini. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang proaktif dalam memberikan informasi dan memastikan pemahaman yang baik dari masyarakat terkait dengan program PKH. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, dan komitmen terhadap transparansi serta kebijakan yang baik, desa Maduretno dapat mengoptimalkan pelaksanaan program PKH. Evaluasi tahunan yang dilakukan juga menjadi landasan bagi kebijakan PKH di tahun-tahun selanjutnya, sehingga program ini dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa Maduretno.

Desa Maduretno dapat dianggap sebagai contoh yang baik dalam menjalankan program PKH. Prinsip-prinsip transparansi, kebijakan yang baik, struktur birokrasi yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor-faktor penting yang mendukung kesuksesan implementasi program ini.

2. Hasil dan Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti kepada beberapa penerima manfaat program PKH. PKH memberikan manfaat terhadap peningkatan pendidikan masyarakat di desa Maduretno. Manfaat tersebut berkaitan dengan dua hal: mencegah anak putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada anak penerima manfaat program PKH tidak terdapat anak yang memakai seragam dan perlengkapan sekolah yang kurang layak. Dengan adanya PKH di Desa Maduretno dapat meringankan beban orangtua untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Suwarti selaku penerima manfaat berikut ini:

“Alhamdulillah mbak, karena program ini anak saya bisa membeli peralatan sekolah. Anak saya dari dulu yang dikeluhkan memang biasanya salah satunya perlengkapan sekolah mereka. Seperti alat tulis, buku, seragam dan lain-lain. Karena PKH anak saya bisa membeli beberapa peralatan sekolah yang mereka butuhkan”

Program PKH memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di desa Maduretno, baik dalam mencegah anak-anak putus sekolah maupun meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Bantuan dari PKH memungkinkan anak-anak dapat membeli peralatan

sekolah yang diperlukan, seperti alat tulis dan buku, sehingga mereka dapat.

Hal yang sama juga diucapkan dalam salah satu petikan wawancara berikut ini:

“Ya mbak, sangat membantu keluarga kami, anak-anak bisa beli perlengkapan sekolah tanpa harus takut tak bisa makan. Ya setidaknya dengan begitu anak-anak bisa semangat sekolah dan tidak lagi berpikiran mau putus sekolah untuk bantu orang Taunya mencari uang”

Dari petikan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program PKH memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah anak putus sekolah. Penerima manfaat PKH menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan oleh program ini sangat membantu keluarganya. Anak-anak dapat membeli perlengkapan sekolah tanpa harus merasa khawatir tentang kebutuhan dasar mereka, seperti makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya memberikan bantuan dalam hal pendidikan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang dapat mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak-anak. Dengan adanya bantuan dari PKH, anak-anak memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk sekolah dan tidak lagi berpikir untuk putus sekolah demi membantu keluarga mencari uang.

BAB V

PEMBAHASAN

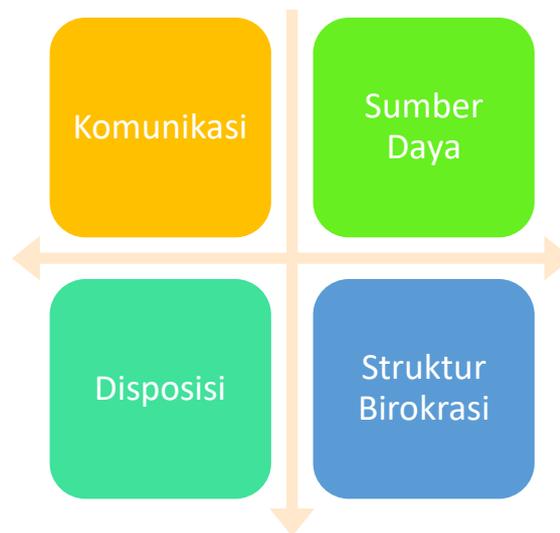
Dalam uraian bab ini peneliti akan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian lapangan. Dalam bab ini peneliti akan mencoba mengeksplorasi dengan mendalam informasi dan data di lapangan dan mengintegrasikannya berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab kajian teori. Selayaknya penelitian kualitatif penelitian ini akan mencoba menyajikan temuan penelitian dalam kalimat-kalimat deskriptif-naratif. Temuan-temuan penelitian yang didapatkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi akan dijelaskan dan diidentifikasi agar sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

A. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang ditetapkan oleh kementerian sosial adalah meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, secara khusus tujuan Program keluarga Harapan di bidang pendidikan adalah meningkatkan taraf pendidikan anak usia sekolah.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III⁷⁰ dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Bagan 4: Implementasi Program PKH



1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno. Komunikasi dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada pelaksana program, penyampaian informasi diperlukan agar para pelaksana Program Keluarga Harapan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan pada

⁷⁰ *Ibid.*

masyarakat. Edward III menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam variabel komunikasi, antara lain aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi atau penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik, sedangkan penyaluran informasi yang buruk akan menghasilkan implementasi yang buruk juga. Penyaluran informasi Program Keluarga Harapan di Desa Maduretno dilakukan oleh pendamping PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara melakukan sosialisasi pada pertemuan awal. Pada pertemuan awal ini pendamping mensosialisasikan tentang hal-hal dasar dalam Program Keluarga Harapan sehingga para KPM memiliki pemahaman dan siap sebagai penerima manfaat dari PKH.

2. Sumber Daya

Faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni sumber daya. Bagi Edward, adanya sumber daya yang memadai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Adapun sumber daya yang dimaksud oleh Edward meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Peranan dari keempat unsur dari sumber daya tersebut harus dapat dipastikan keberadaannya oleh pemerintah sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menempati urutan terawal yang harus dipersiapkan oleh pemangku kebijakan sebelum mengimplementasikannya di lapangan. Sumber daya manusia sendiri merujuk pada individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik, seperti pegawai negeri, tenaga kontrak, atau relawan. Keberhasilan suatu kebijakan publik tergantung pada kemampuan dan kualitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan.

b) Sumber Daya Finansial

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, faktor krusial lainnya yang tak kalah penting diperhatikan adalah soal sumber daya finansial. Sumber daya finansial ini mencakup semua sumber daya yang terkait dengan aspek keuangan, seperti dana, anggaran, dan alokasi sumber daya. Setidaknya, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan, *pertama*, menentukan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dari kebijakan publik, *kedua*, melakukan pengawasan untuk memastikan apakah alokasi anggaran tersebut telah digunakan secara tepat atau tidak.

c) Sumber Daya Peralatan

Ketersediaan sumber daya peralatan menjadi faktor penentu lainnya di lapangan apakah suatu kebijakan publik dapat berjalan secara optimal atau tidak. Sumber daya peralatan ini mencakup semua sumber daya yang terkait dengan peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Ketersediaan sumber daya peralatan yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa instrumen sumber daya peralatan (fasilitas) yang ada dalam konteks implementasi program PKH:

Pertama adalah Peralatan Administratif: Sumber daya peralatan administratif, seperti komputer, printer, dan perangkat lunak, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas administratif terkait PKH. Misalnya, dalam pengelolaan data penerima manfaat, verifikasi informasi, dan penyusunan laporan. Ketersediaan peralatan administratif yang memadai akan membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Peralatan Komunikasi: Sumber daya peralatan komunikasi, seperti telepon, akses internet, dan perangkat komunikasi lainnya, sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi antara badan pelaksana PKH dan penerima manfaat. Peralatan komunikasi yang baik akan memungkinkan komunikasi

yang efektif dan lancar, baik dalam memberikan informasi, menerima masukan dari penerima manfaat, atau memberikan bimbingan dan arahan.

Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan Data: Dalam pengelolaan PKH, sumber daya peralatan juga mencakup fasilitas penyimpanan dan pengolahan data. Misalnya, ruang server, perangkat penyimpanan data, dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyimpan data penerima manfaat dengan aman. Ketersediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan data yang memadai akan membantu dalam menjaga keamanan dan ketersediaan informasi yang relevan.

Infrastruktur Pendukung: Sumber daya peralatan juga meliputi infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan PKH. Misalnya, gedung kantor, ruang pertemuan, dan fasilitas transportasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan operasional seperti rapat, pelatihan, atau kunjungan lapangan. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

a) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan atau *authority* mencakup kekuasaan, legitimasi, dan hak otoritas yang diberikan oleh hukum atau aturan yang berlaku dalam suatu negara atau organisasi. Dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya kewenangan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Pengelolaan sumber daya kewenangan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik, serta memperkuat legitimasi dan dukungan dari publik dan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kewenangan dilakukan dengan tepat dan efektif, serta dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Sumber daya kewenangan yang diberikan kepada badan atau unit yang terlibat dalam PKH di Desa Maduretno didasarkan pada kekuasaan dan legitimasi yang sah. Pemerintah pusat atau daerah sebagai pemegang otoritas berwenang menetapkan kebijakan PKH dan memberikan mandat kepada badan atau unit di tingkat desa untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini memberikan legitimasi hukum dan kekuasaan bagi badan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pengelolaan sumber daya kewenangan dalam PKH Desa Maduretno dilakukan secara transparan. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dapat diakses oleh publik melalui media pemerintah desa baik dalam bentuk sosialisasi maupun dokumen tertulis. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dengan PKH, termasuk penerima manfaat, dapat memahami bagaimana sumber daya kewenangan digunakan dan mengawasi agar penggunaan sumber daya tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan sumber daya kewenangan yang baik melibatkan komunikasi yang efektif dengan publik dan pihak-pihak terkait. Dalam PKH Desa Maduretno, komunikasi yang terbuka dan terbuka antara badan pelaksana dan penerima manfaat dianggap merupakan aspek terpenting. Penerima diberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, prosedur yang harus diikuti, dan bagaimana pengelolaan sumber daya kewenangan dapat mempengaruhi mereka.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh para pelaku atau *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan publik. Unsur ini berkaitan erat dengan seberapa tinggi tingkat sensitivitas para *stakeholder* kebijakan terhadap persoalan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Artinya, keberhasilan kebijakan publik itu bergantung pada sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang dimiliki oleh para *stakeholder* terkait.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program yang berangkat dari fakta sosial masyarakat Indonesia yang masih terdapat keluarga miskin. Lewat program inilah diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan mendasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Setiap *stakeholder* dari kebijakan PKH semestinya menyadari latar belakang mengapa program ini dibuat. Dengan adanya kesadaran itulah akan membantu memaksimalkan kebijakan PKH sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam konteks implementasi kebijakan PKH di Desa Maduretno, seluruh *stakeholder* yang terlibat sejauh ini mengaku telah berupaya melaksanakannya secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memang seluruh pihak *stakeholder* yang terlibat, mulai dari Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, hingga tim pendamping PKH melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Misalnya, sosialisasi program, pendataan keluarga yang terdampak miskin, membawa data tersebut ke tingkat Kabupaten untuk diproses, sampai penyaluran/pendistribusian dana insentif bagi mereka yang benar-benar layak mendapatkannya.

4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan publik dapat berjalan dengan baik apabila ditopang dengan struktur birokrasi yang jelas. Struktur birokrasi terdiri dari sejumlah badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing badan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tetapi harus bersifat *hierarkis*. Setiap badan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Jika ada salah satu badan yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka akan mempengaruhi tingkat keefektifan dari sebuah kebijakan publik.

Para *Stake holder* PKH di Desa Maduretno menunjukkan manajemen struktur birokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi yang baik. Implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan birokrasi yang baik

di Desa Maduretno, terutama dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan manfaat yang signifikan bagi keefektifan kebijakan publik tersebut. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dan dibahas terkait manajemen struktur birokrasi yang baik di Desa Maduretno adalah sebagai berikut: Hierarki dan Tugas Wewenang: Dalam manajemen struktur birokrasi yang baik, setiap badan atau unit memiliki tugas dan wewenang yang jelas.

Dalam konteks PKH di Desa Maduretno, terdapat badan atau unit yang bertanggung jawab untuk pendaftaran penerima manfaat, verifikasi data, penyaluran bantuan, pemantauan, dan evaluasi. Adanya pembagian tugas yang jelas dan hierarki yang terstruktur membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Standard Operational Procedure atau SOP yang telah ditentukan merupakan panduan yang diperlukan agar setiap badan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. SOP membantu menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam PKH di Desa Maduretno, SOP mungkin meliputi prosedur pendaftaran, verifikasi data, penyaluran bantuan, dan pemantauan. Keberadaan SOP yang jelas memudahkan koordinasi antarbadan dan meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan dan Evaluasi juga merupakan bagian penting dari manajemen struktur birokrasi yang baik adalah adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pengawasan yang ketat terhadap kinerja setiap badan atau unit

membantu memastikan bahwa tugas dan wewenang mereka dilaksanakan dengan baik. Dalam PKH di Desa Maduretno, juga terdapat tim atau bagian yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi hasilnya.

Evaluasi yang berkelanjutan juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan dan memberikan pembaruan yang diperlukan. Ada pula Koordinasi Antar-badan dalam struktur birokrasi. Koordinasi antar-badan menjadi faktor penting. Setiap badan atau unit harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi yang efektif dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, komunikasi yang terbuka, dan saling berbagi informasi. Dalam konteks PKH di Desa Maduretno, koordinasi yang baik antara badan pendaftaran, verifikasi, penyaluran, dan pemantauan dilaksanakan dengan cukup baik dan dapat memastikan kelancaran dan keberhasilan program.

B. Hasil Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga hasil yang didapatkan: hasil positif dengan fakta bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan di Desa Maduretno, PKH juga terbukti dapat mencegah anak putus sekolah dan meningkatnya akses kualitas pendidikan yang lebih baik. Kendati demikian diperlukan evaluasi terhadap beberapa aspek dalam Implementasi kebijakan PKH, khususnya terkait dengan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) di Desa

Maduretno masih berjalan kurang maksimal. Setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakanginya, *pertama* kurangnya transparansi anggaran yang diterima oleh KPM dan *kedua* kelalaian pihak pemerintah Desa dalam mengawasi kinerja dari tim pendamping PKH.

Pertama, kurangnya transparansi anggaran yang diterima oleh KPM. Dalam program PKH, bantuan sosial diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk uang tunai yang diberikan setiap bulan. Namun, seringkali KPM tidak mengetahui secara pasti besaran dana yang diterima dan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol dari KPM terhadap penggunaan dana, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kedua, kelalaian pihak pemerintah Desa dalam mengawasi kinerja dari tim pendamping PKH. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja tim pendamping PKH yang bertugas di Desa Maduretno. Namun, seringkali pengawasan yang dilakukan kurang maksimal, sehingga kinerja tim pendamping tidak terpantau dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih kurang optimal dalam implementasi kebijakan PKH di Desa Maduretno, khususnya terkait dengan fasilitas layanan pendidikan dan pengawasan kinerja tim pendamping. Pemerintah Desa perlu meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan anggaran PKH kepada KPM, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja tim pendamping. Dengan demikian, program PKH dapat berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Maduretno.

Namun demikian faktor positif terlihat dari dampak yang diberikan. Berikut akan dijelaskan mengenai dampak positif PKH terhadap peningkatan pendidikan keluarga di Maduretno:

Bagan 5: Hasil Program PKH



1. Akses Pendidikan

PKH memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah dengan syarat untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

Melalui program ini, banyak keluarga di Desa Maduretno yang mendapatkan akses ke pendidikan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Bantuan ini mendorong partisipasi pendidikan yang lebih tinggi, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Melalui PKH, keluarga di Desa Maduretno yang sebelumnya memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pendidikan. Program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat mereka memenuhi persyaratan pendidikan yang ditetapkan. Persyaratan ini mendorong partisipasi pendidikan yang lebih tinggi baik bagi anak-anak maupun orang dewasa dalam keluarga tersebut.

PKH terbukti memberikan insentif kepada keluarga penerima manfaat untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Bantuan finansial ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembayaran biaya sekolah, buku, seragam, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya bantuan ini, banyak anak di Desa Maduretno yang sebelumnya sulit bersekolah sekarang mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, PKH juga mendorong partisipasi pendidikan orang dewasa di Desa Maduretno. Program ini mengharuskan anggota keluarga yang berusia produktif untuk mengikuti pelatihan keterampilan atau pendidikan nonformal. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memberdayakan anggota keluarga dalam meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Dengan adanya akses dan partisipasi pendidikan yang didorong oleh PKH, masyarakat Desa Maduretno dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, partisipasi pendidikan yang tinggi dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan kesenjangan sosial. PKH Desa Maduretno sebagai kebijakan publik yang berhasil dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan menjadi contoh positif bagi daerah lain. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dan memastikan pengelolaan sumber daya yang baik, program ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan melalui pendidikan.

2. Mencegah Anak Putus Sekolah

Implementasi program PKH di desa Maduretno telah memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah anak-anak putus sekolah. Melalui bantuan yang diberikan oleh PKH, keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka secara lebih baik. Dampak positif ini dapat dilihat dalam beberapa hal.

Pertama, bantuan dari PKH memungkinkan anak-anak untuk membeli peralatan sekolah yang diperlukan, seperti alat tulis, buku, dan perlengkapan

lainnya. Hal ini memastikan bahwa anak-anak memiliki sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar di sekolah.

Bantuan PKH juga dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan, seperti uang sekolah, seragam, atau biaya transportasi. Beban finansial yang dihadapi oleh keluarga miskin dapat dikurangi, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Dengan adanya Program PKH ini, dapat memotivasi anak-anak dan keluarga untuk menghargai pendidikan dan menjadikannya sebagai prioritas. Program PKH juga memberikan kesadaran dan motivasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan. Dengan mengetahui bahwa ada bantuan yang tersedia untuk pendidikan anak-anak, keluarga menjadi lebih termotivasi untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan mendukung proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, melalui bantuan finansial, monitoring, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, program PKH di desa Maduretno telah memberikan dampak yang positif dalam mencegah anak-anak putus sekolah. Program ini memberikan dukungan nyata bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan mereka.

3. Peningkatan Akses Kualitas Pendidikan

Selain mencegah anak putus sekolah, implementasi program PKH di desa Maduretno juga memberikan dampak dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Islam memiliki pandangan terhadap pentingnya

kualitas dalam berbagai hal termasuk dalam hal kualitas pendidikan. Hal tersebut misalnya tersirat dalam ayat al-Baqarah ayat 267 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”

Beberapa hal yang menunjukkan dampak PKH terhadap kualitas pendidikan anak di desa Maduretno adalah sebagaimana berikut ini:

Peningkatan aksesibilitas: Dengan adanya bantuan dari PKH, keluarga penerima manfaat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas. Mereka dapat membayar biaya sekolah, membeli buku dan perlengkapan sekolah, serta memenuhi kebutuhan lain yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini membantu mengurangi hambatan finansial yang seringkali menjadi kendala bagi keluarga miskin dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Meningkatkan partisipasi: Melalui program PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan memantau kehadiran serta partisipasi mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Dengan lebih

banyak anak yang bersekolah, tercipta lingkungan belajar yang lebih aktif dan mendorong semangat belajar di desa Maduretno.

Melalui program PKH, keluarga penerima manfaat juga diberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Dukungan finansial yang diberikan oleh program ini membantu memotivasi keluarga untuk mengutamakan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan budaya yang lebih progresif terkait pendidikan di desa Maduretno.

Dengan adanya dampak-dampak tersebut, implementasi program PKH di desa Maduretno telah berhasil meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong perubahan mindset dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam mencapai kesuksesan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, implementasi Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan beberapa prinsip dan memberikan hasil terhadap tingkat pendidikan masyarakat, sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pertama Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Maduretno dijalankan berdasarkan prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini tercermin dari data lapangan yang menunjukkan Upaya komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan dengan sosialisasi dan validasi, melalui proses pelaksanaan dalam hal penyaluran bantuan terhadap keluarga penerima manfaat. Evaluasi dilakukan dalam kerangka akses program PKH yang dapat dinikmati dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil program keluarga Harapan (PKH) di desa Maduretno memberikan dampak terhadap tingkat pendidikan masyarakat dalam tiga aspek: Akses pendidikan; mencegah anak putus sekolah; serta akses pendidikan yang berkualitas.

B. Saran

Penelitian ini tentu saja memiliki banyak keterbatasan, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti yang lain

sebagai *ikhtiar* dalam upaya implementasi program keluarga harapan.

Utamanya terhadap kebermanfaatannya terhadap dunia pendidikan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ahmadi, Rulam. *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2014.
- Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Ali, Mohammad, dan Muhammad Asrori. *Metodologi dan aplikasi riset pendidikan*. Bumi Aksara, 2022.
- Azra, Azyumardi. *Esei-esei intelektual Muslim dan pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Beik, Irvan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewi, Desak Ketut Ratna, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini, dan M M Se. "Pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan." *Jurnal manajemen indonesia* 4, no. 1 (2016).
- Ditjen Jaminan Sosial RI. Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI § (2021).
- Hasan, Nurul Fatma. "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 1 (2017): 1–18.
- Hasbullah, H. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 2017.
- Hermawati, Istiana. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)*. Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Lentera Hati, 2012.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2003.
- Lailanahdiya, Lailanahdiya. "Pandangan Masyarakat Pedagang Kecil Tentang Pendidikan Formal Anak: Studi Masyarakat Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Lodge, Rupert C. *Philosophy of education*, 1937.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, dan Suryadi Suryadi. "Policy implementation analysis: exploration of george edward iii, marilee s grindle,

- and mazmanian and sabatier theories in the policy analysis triangle framework.” *JPAS (Journal of Public Administration Studies)* 5, no. 1 (2020): 33–38.
- Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan*. Vol. 67. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Octaviani, Rika, dan Elma Sutriani. “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.” INA-Rxiv, 2019.
- Putra, Nusa, dan Hendrawan. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rahman, Abdul, Wahyu Naldi, Adiyatna Arifin, dan Fazlur Mujahid. “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Np 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia.” *ANALISIS UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA* 4, no. 1 (2021): 98–107.
- RI, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019.” Jakarta, 2018.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rosalina, Shella Yulia. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan ngaliyan kota semarang (Analisis Bimbingan Penyaluran Islam).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2018.
- Rusydi, Rusydi. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 17, no. 1 (2017): 77–84.
- Sopa, Patia. “ANALISIS PERAN BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) GUNA MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Subarsono, A G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Cetakan Ke. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syahrhani, Syahrhani. “Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.” fakultas Ilmu Sosial, 2016.

Tirtarahardja, Umar, dan S L La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi*. 9 ed. Erlangga, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Draft/transkrip wawancara

(Wawancara dilakukan dengan teknik snowball (bola salju). Artinya wawancara dilakukan dengan interaktif. (Tidak kaku). Transkrip wawancara berfungsi sebagai pedoman saja, peneliti tidak harus terpaku pada pedoman. Artinya data dapat dieksplorasi sepanjang relevan dengan kebutuhan data.

Wawancara dengan Kepala Desa:

1. Perkenalan.
2. Bisakah Bapak/Ibu menceritakan mengenai sejarah singkat Desa Maduretno?
3. Ada berapa penerima manfaat PKH rata-rata setiap tahunnya?
4. Bagaimana Implementasi Program dilakukan?
5. Bagaimana Perencanaannya?
6. Bagaimana Pelaksanaannya?
7. Bagaimana Evaluasi dilakukan setiap tahun?
8. Bagaimana hasil yang didapatkan?
9. Manfaat apa saja yang didapatkan?
10. Adakah faktor pendukung dan Penghambat pelaksanaan program di masyarakat?

Wawancara dengan Pendamping Desa?

1. Perkenalan.
2. Bisakah Bapak/Ibu menceritakan mengenai sejarah singkat Desa Maduretno?
3. Ada berapa penerima manfaat PKH rata-rata setiap tahunnya?
4. Bagaimana Implementasi Program dilakukan?
5. Bagaimana Perencanaannya?
6. Bagaimana Pelaksanaannya?
7. Bagaimana Evaluasi dilakukan setiap tahun?
8. Bagaimana hasil yang didapatkan?
9. Manfaat apa saja yang didapatkan?
10. Adakah faktor pendukung dan Penghambat pelaksanaan program di masyarakat?

Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

1. Perkenalan.
2. Bagaimana anda tau menerima program PKH?
3. Pernah ikut sosialisasi dari desa?
4. Menurut anda apakah sudah maksimal bantuan PKH?
5. Menurut anda apakah tepat sasaran program PKH?
6. Bagaimana Pelaksanaannya?
7. Bagaimana Evaluasi dilakukan setiap tahun?
8. Bagaimana hasil yang didapatkan?
9. Manfaat apa saja yang didapatkan?
10. Adakah faktor pendukung dan Penghambat pelaksanaan program di masyarakat?
11. Terhadap pendidikan keluarga anda bagaimana dampaknya?
12. Berapa besaran yang anda terima?
13. Apa saran anda untuk program PKH ke depan?

Lampiran II: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http://fitk.uin-malang.ac.id. email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 2880/Un.03.1/TL.00.1/12/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

23 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Desa Maduretno
di
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Nuraini
NIM : 16130085
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester - Tahun Akademik : Ganjil - 2021/2022
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri
Lama Penelitian : Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 (3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AR. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 20003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi PIPS
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PAPAR
KANTOR DESA MADURETNO
 Jln. SD NO.01 MADURETNO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 250 /418.73.11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menerangkan bahwa :

1. Nama : **NURAINI**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, tanggal lahir : KEDIRI, 25 September 1996
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Nomor KTP : **3506142509960001**
 Alamat : RT.2 RW.1 DSN.SLAMBUR KIDUL DS.MADURETNO KEC.PAPAR
 KAB. KEDIRI
2. Orang tersebut adalah benar penduduk Desa Maduretno Kecamatan Papar Kab. Kediri
3. Mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan survey / Penelitian di Kantor Desa Maduretno Kec. Papar Kab. Kediri

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk Pengajuan Skripsi

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang bersangkutan

NURAINI



Lampiran II: Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas diri**

Nama : Nurai'ni
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 25 September 1996
Alamat : Dsn. Slambur Kidul Ds. Maduretno Kec. Papar Kab. Kediri
Email : nurainiips16@gmail.com
Kontak : 085853787429

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN maduretno II
- b. Mts Roudlotun Nasyi'in Mojokerto
- c. SMAN 1 Papar

C. Pengalaman Organisasi

- a. Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Malang



Malang, 21 Juni 2023
Hormat Saya,

(Nurai'ni)